



# LAPORAN

## HASIL EVALUASI

### PELAKSANAAN RKPD DAN RENJA PROVINSI NTB TRIWULAN III 2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan III tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan Evaluasi RKPD Triwulan III merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan III Tahun 2023. Laporan ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB. Sampai Triwulan III Tahun 2023, terdapat 14 indikator atau 37,84 persen telah dapat diukur pencapaiannya dimana sebanyak 9 indikator atau 24,32 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2023, sedangkan 5 indikator atau 13,51 persen belum mencapai target. Sisanya sebanyak 23 indikator atau 62,16 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

Selain IKU, Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023, dimana sebanyak 32 Indikator sudah dapat diukur pencapaiannya dengan 21 indikator atau 20,39 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 11 indikator atau 10,68 persen belum memenuhi target. Sisanya sebanyak 71 indikator atau 68,93 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, Oktober 2023  
Kepala BAPPEDA PROVINSI NTB  
  
Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650231 199403 1 153

## RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2023 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan III merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan III Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.991.980.923.513.

Hasil capaian kinerja sampai Triwulan III tahun 2023 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata capaian kinerja sebesar 57,98 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.058.465.618.085 atau 51,04 persen. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena pekerjaan pada Triwulan III masih terfokus pada program kegiatan yang bersifat administratif, dan pembayaran hutang pada Tahun Anggaran 2022, serta adanya kebijakan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan perangkat daerah tahun anggaran 2023 yang pendanaannya bersumber dari dana bebas seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bebas dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan IV tahun anggaran 2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sampai Triwulan

III Tahun 2023, terdapat 14 indikator atau 37,84 persen telah dapat diukur pencapaiannya dimana sebanyak 9 indikator atau 24,32 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2023, sedangkan 5 indikator atau 13,51 persen belum mencapai target. Sisanya sebanyak 23 indikator atau 62,16 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kapasitas Daerah, Rata rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Opini BPK.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023, dimana sebanyak 32 Indikator sudah dapat diukur pencapaiannya dengan 21 indikator atau 20,39 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 11 indikator atau 10,68 persen belum memenuhi target. Sisanya sebanyak 71 indikator atau 68,93 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Tujuan .....	2
1.4 Sasaran.....	3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	3
BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 .....	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 .....	4
2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 .....	5
2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2023.....	6
BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2023.....	10
BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 TRIWULAN III .....	31
4.1 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sampai Tahun 2023 .....	31
4.2.1 Indikator Kinerja Utama .....	31
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah.....	40
BAB V : PENUTUP .....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Rekomendasi .....	52

# **BAB I : PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023. Sebagai gambaran bahwa dalam tahapan pencapaian RPJMD Provinsi NTB pada tahun pertama fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2018 dengan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat, tahap kedua penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang pada masa pandemi Covid-19, tahap ketiga dan keempat fokus pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat dengan penguatan industrialisasi dan penanggulangan kemiskinan dampak pandemi Covid-19 dan tahun kelima atau tahun terakhir adalah merupakan pencapaian kegemilangan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri dengan Indeks Pembangunan Manusia yang semakin tinggi dengan mengusung Tema: "Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan".

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub

kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2023 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023;

2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

#### **1.4 Sasaran**

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2023 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan III tahun 2023 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2023.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Laporan**

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2023. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2023. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2023.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan III Tahun 2023. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2023 sampai Triwulan III.
- Bab V : Penutup



## **BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023**

### **2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2023**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang". Dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

**Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP"** melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

**Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI"** melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

**Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS"** melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

**Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI"** melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

**Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI"** melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

**Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH"** melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi Daerah
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Peningkatan PAD Dan Pelayanan Publik, dengan strategi:
4. Peningkatan Industrialisasi Sektor Unggulan
5. Pembangunan Infrastruktur Layanan dasar dan kualitas lingkungan
6. Perluasan Lapangan Kerja
7. Percepatan Penurunan Kemiskinan

### **2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2023**

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023 yaitu **"Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan"**. Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2023 yaitu :

1. Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana, mendukung Prioritas Nasional 6;
2. Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi, mendukung Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5;
3. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik mendukung Prioritas Nasional 7
4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM, mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Nasional 3;
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM, mendukung Prioritas Nasional 3;
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan, mendukung Prioritas Nasional 6;
7. Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis Dalam Mendukung Investasi, mendukung Prioritas Nasional 1;
8. Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19, mendukung Prioritas Nasional 1;
9. Industrialisasi Produk Unggulan, mendukung Prioritas Nasional 1;
10. Penguatan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mendukung Prioritas Nasional 4.

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan Tahun 2023 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2023**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2023	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	115,83	
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,72	
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas				Point	81,17
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	86,60	
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	BB	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65	
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55	
				3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	
Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48					
	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30,49					
Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan						Point	63,10
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah			Tahun	13,79	
			Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	7,07	
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	68,25	
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks Kualitas Air	Point	43,03	
					Indeks Kualitas Udara	Point	87,59	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2023
	dan lingkungan yang berkelanjutan	bersih dan berkelanjutan		Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,66
Indeks Kualitas Tutupan Lahan					Point	69,70	
Neraca pengelolaan sampah					%	100,00	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan				Persentase Penanganan Sampah	%	70,00	
				Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00	
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	75,56
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	68201,79
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100,00
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,20
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	80,59
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46
					Rasio Elektrifikasi	%	99,99
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.944
						%	4,50

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2023
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	137,24
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	9,00
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	179,91
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	13,25
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07
			Partisipasi politik masyarakat			%	85,20
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	61,40
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	100,00

## **BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2023**

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023. Adapun program pembangunan daerah pada Tahun 2023 sebanyak 120 program dari 147 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)
6. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Penyelenggaran Pengawasan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi
16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Program Pendaftaran Penduduk
20. Program Pencatatan Sipil
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pembinaan Perpustakaan

29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
30. Program Pelayanan Penghubung
31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35. Program Pengelolaan Pendidikan
36. Program Pengembangan Kurikulum
37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50. Program Pengelolaan Hutan
51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
55. Program Pengelolaan Persampahan
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
64. Program Penyuluhan Pertanian



65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
66. Program Pengelolaan Hutan
67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
73. Program Rehabilitasi Sosial
74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
83. Program Pengembangan Perumahan
84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
86. Program Pengembangan Ekspor
87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
91. Program Pemasaran Pariwisata
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
98. Program Pengembangan Umkm
99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
100. Program Penempatan Tenaga Kerja
101. Program Hubungan Industrial
102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
105. Program Kesejahteraan Rakyat
106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
107. Program Pengembangan Kebudayaan
108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
109. Program Pembinaan Sejarah
110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
112. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum
113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
116. Program Perlindungan Perempuan
117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
120. Program Perlindungan Khusus Anak

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran Pembangunan Pada Tahun 2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
<b>Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah</b>							
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana</b>	<b>Indeks Risiko Bencana</b>	<b>Point</b>	<b>115,83</b>		<b>115,83</b>		
<b>Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana</b>	<b>Indeks Kapasitas Daerah</b>	<b>Point</b>	<b>0,65</b>		<b>0,65</b>		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	40,09	5.537	40,09	14.445	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50		92,50		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	2.572	100	7.543	Dinas Sosial
<b>Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan</b>	<b>Indeks Aksesibilitas</b>	<b>Point</b>	<b>81,17</b>		<b>81,17</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar</b>	<b>Persentase Kemantapan jalan</b>	<b>%</b>	<b>86,60</b>		<b>86,60</b>		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	86,60	251.253	86,60	931.804	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar</b>	<b>Persentase Kemantapan Sistem Irigasi</b>	<b>%</b>	<b>54,50</b>		<b>54,50</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	76,28	91.491	76,28	342.401	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah</b>	<b>Persentase konektivitas transportasi publik</b>	<b>%</b>	<b>89,14</b>		<b>89,14</b>		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81.63	5.535	81.63	14.665	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100		100		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40		40		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58		52.58		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66.06	932	66,06	2.261	Dinas Perhubungan
<b>Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi</b>							
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Point</b>	<b>BB</b>		<b>BB</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>Status</b>	<b>WTP</b>		<b>WTP</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	824.559	100	2.275.817	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	1.202	100		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	2.062	75	5.689	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	1.447	90	3.807	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89	2.841	48,89		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	7,55	533	7,55	1.402	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97	2.106	97		
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD</b>	<b>%</b>	<b>38,65</b>		<b>38,65</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	585	38,44	1.668	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54,03	16.212	54,03	46.184	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Kategori</b>	<b>A (80,01 - 90,00)</b>		<b>A (80,01 - 90,00)</b>		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	5.431	100	14.444	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	14.225	100	37.833	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	1.108	100	2.917	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	961	26,66	2.529	INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkatkan	%		1.412		3.842	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	3.486	100	9.485	Biro Pemerintahan
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>	<b>Point</b>	<b>0,72</b>		<b>0,72</b>		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19	7.865	19	21.515	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		115		135		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		134		136		
	Nilai Aspek Sistem Informasi		19		19		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	18.248	0,10	51.655	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04		0,04	-	
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15		0,15	-	
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62		0,62		
<b>Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>Point</b>	<b>4,55</b>		<b>4,55</b>		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90	346	98,90	880	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	257	100	654	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	1.242	100	3.155	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	%	25	119	25	267	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	80	6.703	80	16.947	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	65	2.464	65	6.229	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	605	30	1.531	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	590	50	1.492	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90	115	90	300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	1.294	100	3.406	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	237	100	624	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	43.000		43.000		Badan Penghubung Daerah

**Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kehatan untuk SDM yang berdaya saing</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>Point</b>	<b>73,05</b>		<b>73,05</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat</b>	<b>Angka Harapan Hidup</b>	<b>Tahun</b>	<b>67,48</b>		<b>67,48</b>		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kehatan yang terakreditasi	%	85	176.236	85	490.193	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kehatan	%	97		97		
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kehatan yzng sesuai standar	%	80		80		
	Persentase pelayanan kehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		100		
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	100		100		
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100		100		
	Persentase fasilitas pelayanan kehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	1.499	3	3.651	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95	108	95	240	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	90	56.163	90	163.140	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	11.992	76,19	29.810	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80		80	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	80,00	59.051	80,00	144.479	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
<b>Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat</b>	<b>Persentase Balita Stunting</b>	<b>%</b>	<b>30,49</b>		<b>30,49</b>		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	10,41		10,41	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	100	1.987	80	5.060	Dinas Kesehatan
<b>Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Point</b>	<b>63,10</b>		<b>63,10</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan</b>	<b>Harapan Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>13,79</b>		<b>13,79</b>		
	<b>Rata rata Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>7,07</b>		<b>7,07</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	516.005	100	1.486.214	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28		95,28		
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02		98,02		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6		70,6		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		1		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18		18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10		1:10		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	723	100	1.987	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang	%	100	71.966	100	208.215	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	memenuhi Kualifikasi S1/DIV						
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100		100		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		100		
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	70		100		
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		6,5		80		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	68	6,5	195	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	30	322	100	832	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	4.339	100	11.297	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	12.204	100	31.488	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan</b>							
<b>Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>Point</b>	<b>68,46</b>		<b>68,46</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Air</b>	<b>Point</b>	<b>43,03</b>		<b>43,03</b>		
	<b>Indeks Kualitas Udara</b>	<b>Point</b>	<b>87,59</b>		<b>87,59</b>		
	<b>Indeks Kualitas Air Laut</b>	<b>Point</b>	<b>71,48</b>		<b>71,48</b>		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24,24	369	24,242424	1.025	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	1.020	30	2.835	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	1	109	3	233	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	109	210	232	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	30	218	30	605	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	228	10	632	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	231	60	641	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>	<b>Point</b>	<b>69,70</b>		<b>69,70</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	100	22.201	100	61.711	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		30	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503	1.023	30.503	2.843	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	17,70	765	48,67	2.125	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4,00	5.143	4,00	14.296	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	1.444	90,31	3.018	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan</b>	<b>Neraca pengelolaan sampah (%)</b>	%	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Penanganan Sampah</b>	%	<b>70,00</b>		<b>70,00</b>		
	<b>Persentase Pengurangan Sampah</b>	%	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	100	5.794	100	15.916	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi</b>							
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas</b>	<b>Indeks Daya Beli (Point)</b>	%	<b>75,56</b>		<b>75,56</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>	<b>Rp. Milyar</b>	<b>17.814</b>		<b>17.814</b>		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	60	10	60	1.099	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100,00	1.050	100	2.629	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	93	780	93	1.954	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	60	1.080	60	2.703	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	171	100	428	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas</b>	<b>Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan &amp; kehutanan</b>	<b>%</b>	<b>23,88</b>		<b>23,88</b>		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	46.161	10	135.417	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	582	100	1.708	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	2.885	< 1	8.464	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	436	100	1.279	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	2,05	24.040	2,05	64.205	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	96,79	83.007	96,79	267.361	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	2		10	-	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	434	96,5	1.229	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	6.731	100	18.895	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		30	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	9,5	5.553	9,5	15.330	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256.572	9.895	256.572	11.895	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.243.385	6.021	1.243.385	32.729	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99,93	2.129	99,93	8.943	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215700	929	215700	2.897	Dinas Kelautan dan Perikanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
<b>Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85		85	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	803	100	2.356	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,5	18.207	4,5	53.398	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	12.713	100	37.284	Dinas Sosial
<b>Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan</b>	<b>Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</b>	<b>Skor</b>	<b>87,20</b>		<b>87,20</b>		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	86,62	255	86,62	771	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	4.170	100	11.466	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	4,77	425	3,77	1.142	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90,00	639	90,00	1.857	Dinas Ketahanan Pangan
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan Air Minum</b>	<b>%</b>	<b>80,59</b>		<b>80,59</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	80,59	3.950	80,59	10.224	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak</b>	<b>%</b>	<b>82,46</b>		<b>82,46</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100		100	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	84.511	167.445	253391,4	587.291	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Rasio Elektrifikasi</b>	<b>%</b>	<b>99,99</b>		<b>99,99</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5,57	791	5,57	1.992	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,99	2.203	99,99	5.546	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)</b>	<b>%</b>	<b>68,95</b>		<b>68,95</b>		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	2.595	100	7.064	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91		98,91		
<b>Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok</b>	<b>Inflasi</b>	<b>%</b>	<b>3,0 - 4,0</b>		<b>3,0 - 4,0</b>		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	80	305	80	874	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	1.804	4	5.179	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	7	1.418	7	4.071	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	90	1.364	90	3.915	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	13.080	100	37.550	Dinas Perdagangan
<b>Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk</b>	<b>Pengeluaran per kapita (Rp.000)</b>	<b>Rp.000</b>	<b>11.944</b>		<b>11.944</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
<b>memenuhi kebutuhan hidup</b>							
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	640	100	4.834	Dinas Perdagangan
<b>Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan</b>	<b>Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)</b>	<b>%</b>	<b>4,50</b>		<b>4,50</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata</b>	<b>Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)</b>	<b>Rp. Miliar</b>	<b>137,24</b>		<b>137,24</b>		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	100	6.084	100	16.580	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	50		50	-	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		2.705		7.392	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		232		607	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		1.283		3.506	Dinas Pariwisata
<b>Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul</b>	<b>Pertumbuhan Industri (%)</b>	<b>%</b>	<b>9,00</b>		<b>9,00</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri</b>	<b>Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)</b>	<b>Rp. Miliar</b>	<b>179,91</b>		<b>179,91</b>		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	39.972	100	102.322	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3,55	1.179	3,55	3.018	Dinas Perindustrian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	798	1	2.043	Dinas Perindustrian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6,71	1.929	6,71	4.807	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56,75	3.198	56,75	7.967	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	4.339	100	11.297	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100		
<b>Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>%</b>	<b>3,17</b>		<b>3,17</b>		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	1.420	18	3.482	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57,48	1.284	57,48	3.391	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	23	388	23	1.026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	1.313	23	3.466	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan</b>							
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Indeks Kriminalitas</b>	<b>Point</b>	<b>13,25</b>		<b>13,25</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya &amp; Toleransi Masyarakat</b>	<b>Persentase penurunan konflik sosial</b>	<b>%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	562	10	1.527	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	4.092	11,43	11.105	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	107.560	100	292.643	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70	9.635	70	24.519	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	37		37	-	
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100		100	-	
	Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96		64,96	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	2.257	81,82	6.405	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	529	100	1.427	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	283	100	720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas &amp; Penegakan Produk Hukum Daerah</b>	<b>Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>	<b>%</b>	<b>6,07</b>		<b>6,07</b>		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100,00	4.648	100,00	11.445	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00		100,00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	86,21	898	86,21	2.437	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	2.105	100	5.728	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		100		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		100		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		100		
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Partisipasi Politik Masyarakat (%)</b>	<b>%</b>	<b>85,20</b>		<b>85,20</b>		
<b>Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat</b>	<b>Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik</b>	<b>%</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	100	33.721	100	43.528	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	83,01	601	83,01	1.631	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>Point</b>	<b>61,4</b>		<b>61,4</b>		
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan</b>	<b>Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan</b>	<b>%</b>	<b>20,47</b>		<b>20,47</b>		
	<b>Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65,28	2.440	65,28	6.231	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	83,07	1.111	83,07	2.837	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	5,5	525	15	1.341	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	91	1	201	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	100,00	618	42,00	1.491	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%					
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		878		2.124	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%					

## **BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 TRIWULAN III**

### **4.1 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sampai Tahun 2023**

Laporan evaluasi RKPD Triwulan III merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan III Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.991.980.923.513.

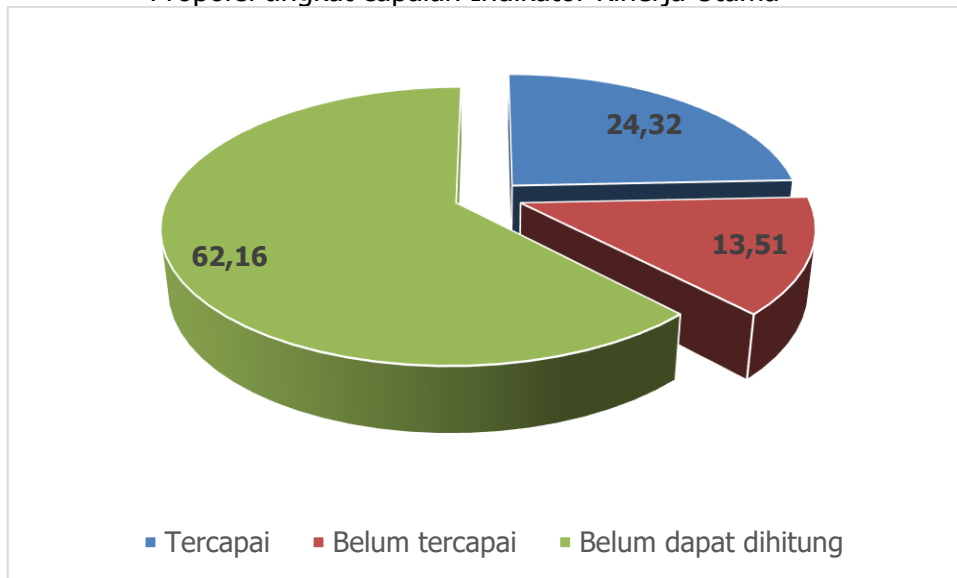
Hasil capaian kinerja sampai Triwulan III tahun 2023 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata capaian kinerja sebesar 57,98 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.058.465.618.085 atau 51,04 persen. Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan sebanyak 103 Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut sampai dengan tahun 2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### **4.2.1 Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan RPJMD 2019-2023, diketahui bahwa terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sampai Triwulan III Tahun 2023, terdapat 14 indikator atau 37,84 persen telah dapat diukur pencapaiannya dimana sebanyak 9 indikator atau 24,32 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2023, sedangkan 5 indikator atau 13,51 persen belum mencapai target. Sisanya sebanyak 23 indikator atau 62,16 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Kontribusi PDRB sektor

pertanian, perikanan & kehutanan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kapasitas Daerah, Rata rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Opini BPK.

Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama



Sumber: Perangkat Daerah, data diolah

Tabel 1. Target dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2019-2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			Triwulan III 2023			
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	142,90	139,4	129	128,05	122,3	119,41	119,83	99,65	115,83	0,00	0,00	
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,53	0,55	0,57	0,63	0,63	0,63	0,72	114,29	0,72	0,72	114,29	
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	73,69	74,6	76,02	77,77	78,81	79,84	81,31	101,84	81,17	0,00	0,00	
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	80,28	80,05	84,01	85,36	85,36	100,00	86,60	0,00	0,00	
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	50,76	57,07	50,88	52,17	54,50	104,47	54,50	0,00	0,00	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	73,72	74,76	78,64	90,29	88,00	86,86	92,00	105,92	89,14	0,00	0,00	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	CC	CC	B	B	B	BB	B	95,67	BB	0,00	0,00	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	34,77	35,09	35,46	36,97	43,18	116,80	38,65	48,12	124,50	
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	BB	B	BB	BB (76,01 - 80,00)	BB	100,00	A (80,01 - 90,00)	0,00	0,00	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,54	0,59	0,69	0,70	0,64	91,29	0,72	0,00	0,00	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	3,63	3,56	3,54	4,53	3,71	81,90	4,55	0,00	0,00	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			Triwulan III 2023		
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	70,08	70,57	71,20	71,55	71,83	72,43	72,42	99,99	73,05	0,00	109,56
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	66,28	66,51	66,69	67,08	67,07	100,00	67,48	0,00	106,73
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	25,50	23,33	19,23	30,99	16,84	145,66	30,49	0,00	0,00
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	60,39	60,85	61,68	62,42	63,21	62,74	64,14	102,24	63,10	0,00	102,40
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,7	13,90	13,73	13,96	101,68	13,79	0,00	101,31
					Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	7,27	7,31	7,38	7,04	7,61	108,10	7,07	0,00	109,48
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	56,99	75,16	64,56	70,83	69,89	68,22	70,56	103,76	68,25	0,00	0,00
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	40,23	50,98	45,10	42,93	43,39	101,07	43,03	0,00	0,00
					Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	87,40	88,63	88,52	87,56	89,30	101,99	87,59	0,00	0,00
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	-	67,49	80,22	70,89	89,48	102,11	87,66	0,00	0,00
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	65,67	44,82	65,59	68,70	65,61	95,50	69,70	0,00	0,00
		Neraca pengelolaan sampah			%	-	-	41,71	44,82	49,02	85,00	54,98	64,68	100,00	0,00	0,00	
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	34,91	37,63	39,68	60,00	42,20	70,33	70,00	0,00	0,00	
Persentase Pengurangan Sampah	%	-		-	6,80	7,19	9,34	25,00	12,78	51,12	30,00	0,00	0,00				
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	69,76	70,99	72,03	71,19	71,27	74,68	72,15	96,61	75,56	0,00	97,02
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	10.024	11.600	14.879	15.428	21606,67	140,05	68201,79	25.949	38,05
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,06	23,2294016	26,4	23,71	26,14	110,25	23,88	27,20	113,90
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			Triwulan III 2023				
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian		
	pertanian, pariwisata dan industrialisasi			penduduk miskin	jaminan sosial dan kesehatan														
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	85,30	91,30	90,40	86,70	93,30	107,61	87,20	0,00	0,00		
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	-	70,48	72,59	74,88	78,76	78,45	79,11	100,84	80,59	0,00	0,00		
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	78,8	91,36	87,78	80,91	81,83	101,14	82,46	0,00	0,00		
					Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	99,55	99,98	99,98	99,88	99,98	100,10	99,99	0,00	0,00		
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	56,35	62,53	63,47	65,80	62,30	94,68	68,95	0,00	0,00		
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,70	3,16	1,87	0,68	2,12	3,0 - 4,0	6,23	44,25	3,0 - 4,0	0,25	-8,33		
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	10.640	10.351	10.377	11.604	10681,00	92,05	11.944	0,00	92,89		
				Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	7,27	-4,59	-0,08	-28,24	1,35	3,00	24,68	822,67	4,50	14,37	319,33
						Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	112,36	76,13	117,2	-444,54	15,20	129,78	282,70	217,83	137,24	49,35	35,96
				Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	2,00	2,00	4,57	7,08	6,75	7,50	7,40	98,67	9,00	3,26	36,22
						Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	240,99	56,28	165	-110,55	94,66	173,02	87,99	50,86	179,91	-2,43	-1,35



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2017-2021					2022			Triwulan III 2023		
							2017	2018	2019	2020	2021	Target	Capaian	% Tingkat Capaian	Target	Capaian	% Tingkat Capaian
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,42	4,22	3,01	3,19	2,89	109,40	3,17	3,73	111,67
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	18,05	17,25	12,71	13,09	10,67	14,05	8,77	137,58	13,25	0,00	0,00
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	8,70	38,10	46,15	57,14	25	20,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	4,88	52,78	31,21	5,72	22,53	393,88	6,07	0,00	0,00
			Partisipasi politik masyarakat			%	78,44	77,50	82,80	80	NA	84,57	80,00	94,60	85,20	0,00	0,00
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,60	0,65	0,61	0,90	1,26	140,00	1,00	0,00	0,00
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59,95	60,06	55,81	51,96	52,01	61,16	53,12	86,85	61,40	0,00	0,00
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	18,60	26,87	27,24	19,27	27,39	142,14	20,47	0,00	0,00
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10	40	40	50	80	70,00	87,50	100,00	0,00	0,00

Pencapaian sasaran pembangunan daerah periode 2019-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### I. Pencapaian Tujuan Pembangunan

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, dari 6 Misi pembangunan, terdapat 10 (sepuluh) tujuan pembangunan dengan 13 indikator kinerja daerah. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 4 tujuan pembangunan daerah yang telah memenuhi bahkan melampaui target akhir pembangunan pada tahun 2023, 5 tujuan dengan capaian on the track dengan tingkat capaian diatas 85% dan satu tujuan yang masih rendah pencapaiannya. Pencapaian tujuan pembangunan berdasarkan Misi Pembangunan 2019-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan dengan indikator kinerja Indeks Aksesibilitas dari kondisi awal 74,60 pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,31 poin pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 81,17 poin atau dengan tingkat capaian sebesar 100,17%. Pencapaian ini didorong adanya Peraturan Daerah no 77 tahun 2022 tentang pembangunan infrastruktur jalan tahun jamak, meningkatnya akses air minum, rasio elektrifikasi, akses sanitasi, konektivitas antar wilayah, kemantapan irigasi, serta akses rumah layak huni. Kemudian tujuan pembangunan Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan dari 60,85 pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,14 pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 63,10.

Adapun tujuan pembangunan lain yang melampaui target adalah Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana capaian tahun 2018 sebesar 56,99 meningkat menjadi 70,56 pada tahun 2022 dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 68,46. Selain itu tujuan pembangunan Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan dengan indikator kinerja Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) juga mengalami peningkatan yg sangat signifikan dari kontraksi 4,59% pada tahun 2018 meningkat menjadi 24,68%

#### II. Pencapaian Sasaran Pembangunan

- I. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,63 Point dengan realisasi 0,72, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 110,77%.

Untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangana bencana, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 yaitu meningkatkan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana, meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta meningkatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Sampai dengan tahun 2022, Persentase perangkat daerah di provinsi NTB yang telah menerapkan kegiatan penanggulangan bencana sudah mencapai 100%, serta tetap meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana di lingkup perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kota.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana BPBD provinsi NTB memiliki 1 (satu) program kegiatan yaitu program penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana untuk mendukung penanggulangan bencana melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Memfasilitasi Desa Tangguh Bencana
- Memfasilitasi Sekolah / Madrasah Aman Bencana
- Pelatihan Pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA)
- Menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
- Menyusun dokumen rencana kontijensi.
- Menyiapkan sarana dan prasarana beserta data laporan korban bencana
- Melakukan pemindahan warga/masyarakat dari zona berisiko bencana ke lokasi yang lebih aman
- Melakukan pencarian dan evakuasi korban terdampak bencana
- Penyediaan dan pendistribusian logistik sesuai dengan kebutuhan korban terdampak bencana
- Pengelolaan data dan informasi terkait kebencanaan.

2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah, dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan dan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Pada tahun 2022, Persentase Kemantapan jalan ditargetkan sebesar 85,36% dengan realisasi 85,36%, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi ditargetkan sebesar 52,17% dengan realisasi 54,50%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 104,47%

Ralisasi capaian tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar 80,05 %. Realisasi capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 84,01 % dan 85,36 %, hal ini tercapai karena adanya dukungan penanganan jalan melalui program percepatan jalan (Perda Percepatan Jalan) yang berasal dari pembiayaan APBD dan penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara pada tahun 2022 mencapai 540,56 Km, sehingga Panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 1.247,07 Km atau 85,36% dari total Panjang jalan 1.484,43 Km. sementara itu Kemantapan Sistem Irigasi sebagian besar didukung melalui dana alokasi khusus. Pada Tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 untuk mengelola 35 Daerah Irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha. Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57 %), rusak ringan 61,78 km (9 %), rusak sedang 86,05 km (12 %) dan rusak berat 161,03 km (22 %).

Adapun cakupan air minum, dapat ditingkatkan cakupannya pengelolaan SPAM dengan Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan sebanyak 30 unit dengan jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun pada tahun 2022 sebanyak 8.010 KK

3. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,86% dengan realisasi 88,57%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,97%.

Pencapaian konektivitas antar di wilayah didukung oleh peningkatan persentase rute angkutan darat dan angkutan laut. Pada tahun 2022, persentase angkutan darat telah mencapai 98,33% dengan rute angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 122 rute dengan penambahan 2 (dua) rute angkutan yakni 1 (satu) rute angkutan perintis yaitu rute Terminal Mandalika – Leweng dan 1 (satu) rute angkutan KSPN dengan rute BIZAM – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal. Adapun angkutan laut mencapau 84,62% dengan jumlah rute yang terpenuhi sejumlah 22 (dua puluh dua) rute dengan penambahan 1 (satu) rute angkutan Bali – Tawun

II. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, dengan indikator kinerja Opini BPK. Pada tahun 2023 ditargetkan mempertahankan Opini BPK WTP dengan realisasi WTP, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini Audit yang diterbitkan jika Laporan Keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, walaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembalikan keputusan. Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah memenuhi kriteria:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, yaitu meliputi Keberadaan Aset, Kelengkapan Bukti dan Nilai Aset.

Pencapaian WTP Provinsi NTB merupakan Prestasi yang ke-12 secara berturut-turut dari tahun 2011-2023.

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 38,65% dengan realisasi 48,12%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 124,50%.

Penerimaan PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah serta meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi NTB oleh KemenPAN RB pada tahun 2022 menunjukkan nilai 72,77 dengan "predikat B". hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik yang ditandai dengan meningkatnya beberapa komponen yang dinilai antara lain perencanaan kinerja yang mencakup RPMD, Renstra, PK dan Dokumen lainnya telah disusun dengan baik dan telah dibuat secara berjenjang (cascading) oleh seluruh perangkat daerah sampai ke level operasional. Dalam pengukuran kinerja, telah dilakukan

secara berkala triwulanan atas pencapaian kinerja dengan mengacu pada rencana aksi yang telah disusun. Sementara itu, dalam hal pelaporan kinerja, pemerintah provinsi telah menyusun akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai yang telah diperjanjikan dan telah dipublikasi dalam website PPID. Sedangkan terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTB untuk mengevaluasi implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur NTB nomor 77 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

3. Meningkatnya Profesionalisme ASN, dengan, dengan indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,70 point dengan realisasi 0,51 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 72,86%.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,53 point dengan realisasi 3,71 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 81,90%.

III. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup dan Persentase Balita *Stunting*. Pada tahun 2023, Angka Harapan Hidup ditargetkan 67,48 tahun dengan realisasi 72,02 tahun, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 106,73%. Sedangkan Persentase Balita *Stunting* ditargetkan 30,49% dengan realisasi berdasarkan survey EPPGBM sebesar 13,49%, dengan tingkat capaian sebesar 155,76%.
2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Pendidikan, dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah dan Rata rata Lama Sekolah. Pada tahun 2023, Harapan Lama Sekolah ditargetkan sebesar 13,79 tahun dengan realisasi 13,97 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,31%. Sedangkan Rata rata Lama Sekolah ditargetkan sebesar 7,07 tahun dengan realisasi 7,74 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 109,48%

IV. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 42,93 point dengan realisasi 43,39 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,07%. Indeks Kualitas Udara ditargetkan sebesar 87,56 point dengan realisasi 89,30 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,99%. Indeks Kualitas Air Laut ditargetkan sebesar 70,89 point dengan realisasi 89,48 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 102,11%. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan ditargetkan sebesar 68,70 point dengan realisasi 65,61 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 95,50%.
  2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Pada tahun 2022, Persentase Penanganan Sampah ditargetkan sebesar 60% dengan realisasi 42,20%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 70,33%. Sedangkan Persentase Pengurangan Sampah ditargetkan sebesar 25% dengan realisasi 12,78%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 51,12%.
- V. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha), dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 68.202 Triliun dengan realisasi sebesar Rp.25.949 Triliun, dengan tingkat capaian sebesar 38,05%.
  2. Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas, dengan indikator kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 23,88% dengan realisasi sebesar 27,20 dengan tingkat capaian sebesar 113,90%.
  3. Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 100%.
  4. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, dengan indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,70 poin dengan realisasi sebesar 106,99%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 123,40%.

5. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, dan Cakupan Rumah Layak Huni (RLH). Pada tahun 2022, Cakupan Air Minum ditargetkan sebesar 78,45% dengan realisasi sebesar 95,40%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 121,61%. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak ditargetkan sebesar 80,91% dengan realisasi sebesar 83,12%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 102,73%. Rasio Elektrifikasi ditargetkan sebesar 99,88% dengan realisasi sebesar 99,98%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 100,10%. Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) ditargetkan sebesar 65,80% dengan realisasi sebesar 62,30%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 94,68%.
  6. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok, dengan indikator kinerja Inflasi. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,0 - 4,0% dengan realisasi sebesar 0,3%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar -8,33%.
  7. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan indikator kinerja Pengeluaran per kapita. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 11,944 juta dengan realisasi sebesar Rp. 11,095 juta, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 92,89%.
  8. Meningkatnya daya saing pariwisata, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 137,24 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 49,35 miliar, belum memenuhi target dengan tingkat capaian 35,96%.
  9. Meningkatnya daya saing industri, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.179,91 miliar dengan realisasi sebesar Rp. -2,43 miliar, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar -1,35%.
  10. Menurunnya pengangguran terbuka, dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,17% dengan realisasi sebesar 2,8%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 111,67%.
- VI. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase penurunan konflik sosial. Pada tahun 2022 ditargetkan menurun sebesar



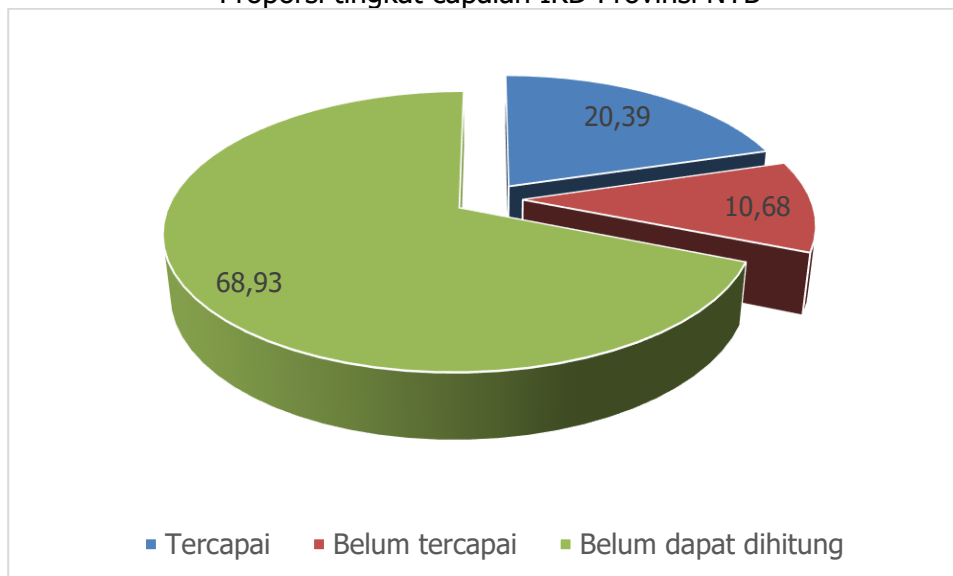
20% dengan realisasi meningkat sebesar 50%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 50%.

2. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Pada tahun 2022 ditargetkan menurun sebesar 5,72% dengan realisasi menurun sebesar 55%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 961,54%.
3. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,90% dengan realisasi sebesar 0,80%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 88,89%.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada tahun 2022, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan ditargetkan sebesar 19,27% dengan realisasi sebesar 27,13%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 140,79%. Sedangkan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 70%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 87,50%

#### **4.2.2 Indikator Kinerja Daerah**

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukkan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB



Sumber: Perangkat Daerah, data diolah

Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

#### 1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

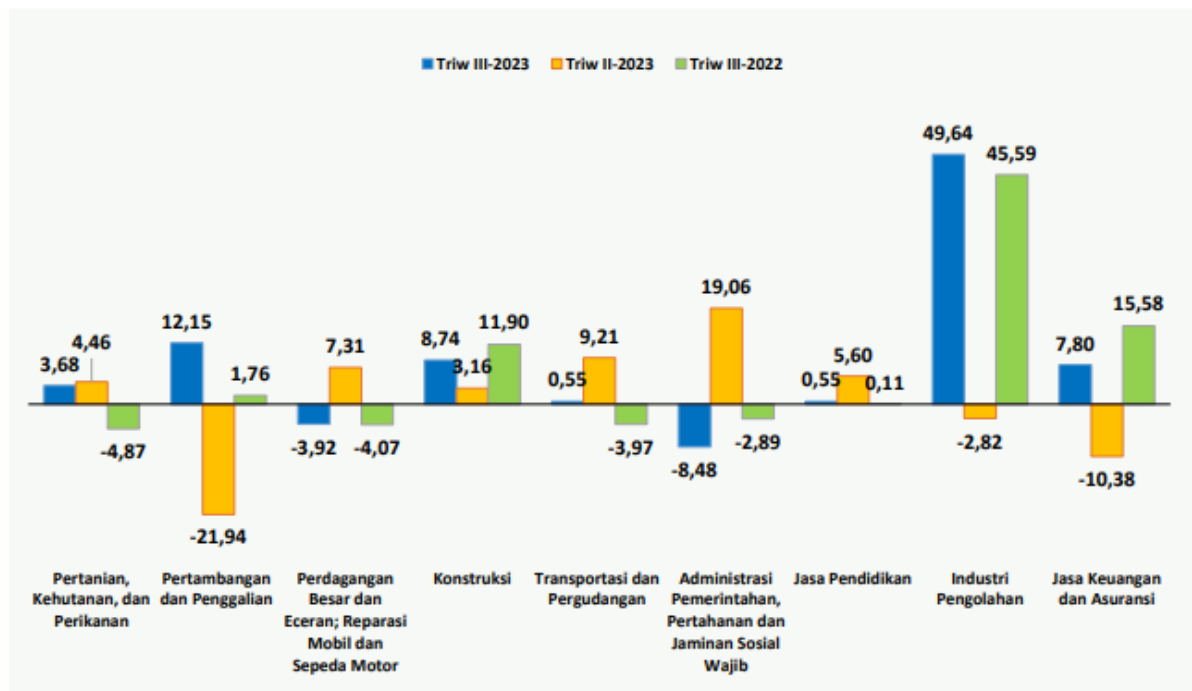
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambahan Bijih Logam	%	4,5-5,5	4,79	106,44
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	2,92	97,33
3	Tingkat Kemiskinan	%	11,92	13,85	83,81
4	Gini Ratio	Point	0,297	0,375	73,74
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	70,09	72,37	103,25

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2023

Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan III-2023 dibanding Triwulan II-2023 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 4,80 persen. Pertumbuhan terjadi pada 14 (empat belas) lapangan usaha sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan

sebesar 49,64 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,15 persen; dan Konstruksi sebesar 8,74 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 7,80 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh 4,70 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 3,68 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya yang terkontraksi yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,48 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,16 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,92 persen.

Gambar Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)



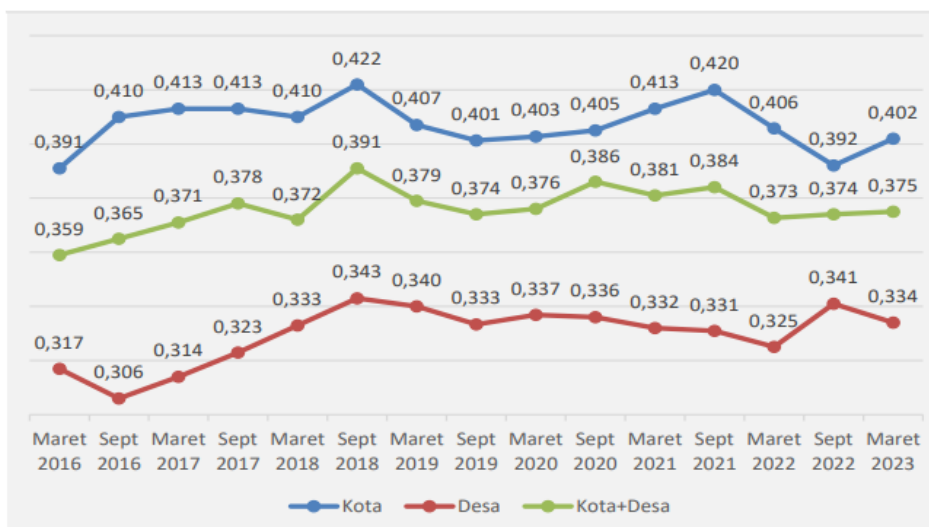
Pada indikator kemiskinan mengalami peningkatan dibanding September 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat sebesar 0,17 persen terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 751,23 ribu orang, bertambah 6,54 ribu orang terhadap September 2022 dan bertambah 19,29 ribu orang terhadap Maret 2022. Capaian tersebut masih berada di atas target penurunan kemiskinan tahun 2023 dalam RPJMD NTB Tahun 2019-2023 yang ditetapkan berada pada rentang 4,5-5,5 persen.

Gambar Profil Kemiskinan Provinsi NTB



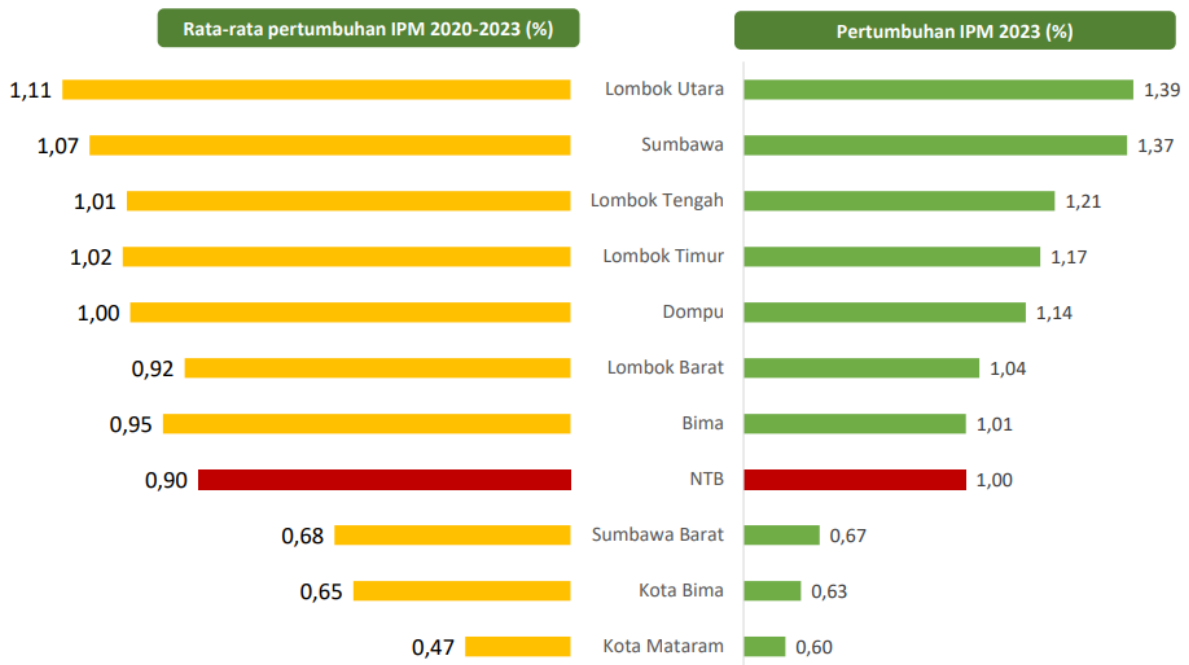
Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, gini rasio penduduk NTB pada Maret tahun 2023 tercatat sebesar 0,375 atau mengalami peningkatan 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,374. Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai *Gini Ratio* provinsi NTB berfluktuasi dalam rentang yang cukup stabil, yaitu diantara 0,348 sampai 0,391. Nilai tertinggi *Gini Ratio* NTB adalah 0,391 yaitu pada September 2014 dan September 2018. Sedangkan nilai terendah adalah 0,348 yaitu pada September 2012. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,402, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,392 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,406. Kemudian untuk daerah perdesaan, pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,334, turun dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,341 dan naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,325.

Gambar Perkembangan Gini Ratio, Maret 2016 - Maret 2023



Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,34 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,21 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,91 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Indikator lainnya yang termasuk ke dalam Aspek kesejahteraan Masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 71,65 di tahun 2022 menjadi 72,37 pada tahun 2023. Capaian IPM Provinsi NTB 2023 berada pada kategori tinggi. Peningkatan capaian IPM Provinsi NTB Tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan seluruh komponen pembentuk IPM, terutama rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Pada tahun 2023, komponen pembentuk IPM Provinsi NTB mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali komponen harapan lama sekolah pada dimensi pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kab. Lombok Utara merupakan wilayah dengan pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2023 sebesar 1,39 persen. Kota Mataram merupakan wilayah dengan pertumbuhan IPM terendah pada tahun 2023 sebesar 0,6.



## 2. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 7 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 1. Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
<b>B</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
1	Indeks Kriminalitas	Point	13,25		
2	Indeks Aksesibilitas	Point	81,17		
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68,25		
4	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	90,31		
5	Indeks Risiko Bencana	Point	115,83		
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB		
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55		

Sumber: Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2023

Terdapat 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana dan Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik. Seluruh indikator pada Aspek Daya Saing Daerah capaiannya belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan mewujudkan kondusifitas daerah, menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menyiapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang paripurna.

### 3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator, urusan pilihan sebanyak 20 indikator, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator. Adapun capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
<b>C</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>				
1	Indeks Pendidikan	Point	63,10	64,61	102,40
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79	13,97	101,31
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,07	7,74	109,48
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
4	Indeks Kesehatan	Point	73,05	80,03	109,56
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	83,00		
6	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46		
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48	72,02	106,73
8	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30,49	13,49	155,76
9	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100		
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
10	Persentase Kemantapan jalan	%	86,60		
11	Cakupan Air Minum	%	80,59		
12	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50		
13	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	27,20		
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>				
14	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95		
<b>1.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				
15	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07		
15	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00		
16	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00		
17	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	30,18		
18	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,65		
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>				
19	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00		
20	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,37		
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>2.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	2,8	111,67
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61,40		
23	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,52		
24	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	21,00		
25	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47		
26	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	100,00		
<b>2.03</b>	<b>Pangan</b>				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
27	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,20		
<b>2.04</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>				
28	Indeks Kualitas Air	Point	43,03		
29	Indeks Kualitas Udara	Point	87,59		
30	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,66		
31	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	100,00		
32	Persentase Penanganan Sampah	%	70,00		
33	Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00		
<b>2.05</b>	<b>Pertanahan</b>				
34	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00
<b>2.06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
35	Rasio Penduduk BerkTP Persatuan Penduduk	rasio	0,88	0,96	109,09
<b>35</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
36	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	33,69	36,26	107,63
37	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	91,00	93,05	102,25
<b>2.08</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
38	Pertumbuhan Penduduk	%	0,95		
<b>2.09</b>	<b>Perhubungan</b>				
39	Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14		
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
40	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Kolaborasi		
41	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	75		
<b>2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
42	Persentase Koperasi Aktif	%	70,00		
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>				
43	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	68.202	25.949	38,05
<b>2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>				
44	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	210		
45	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15		
46	Proporsi wirausaha muda	%	68,39		
<b>2.14</b>	<b>Statistik</b>				
47	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	65,00		
<b>2.15</b>	<b>Persandian</b>				
48	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	III+		
<b>2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>				
49	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	33,04		
<b>2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
50	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100,00	100,00	100,00
51	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	39,86	42,75	107,26
<b>2.18</b>	<b>Kearsipan</b>				
52	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	100,00	94,50	94,50
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>				
<b>3.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
53	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,74		
54	Produksi Perikanan	Ton	1.499.957		
55	Nilai Tukar Nelayan	%	>110		
<b>3.02</b>	<b>Pariwisata</b>				
56	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	4,50	14,37	319,33
57	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	100,00		
58	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,35	1,89	56,42
59	Angka kunjungan wisatawan	orang	23.100.000		
60	Persentase Geosites yang Tertata	%	50,00		
61	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	137,24	49,35	35,96
<b>3.03</b>	<b>Pertanian</b>				
62	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88	27,20	113,90
63	Nilai Tukar Petani	Point	>105	120,39	100,00
<b>3.04</b>	<b>Kehutanan</b>				
64	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,70		
65	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	20,08		
<b>3.05</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>				
66	Rasio Elektrifikasi	%	99,99		
<b>3.06</b>	<b>Perdagangan</b>				
67	Indeks Daya Beli	Point	75,56	73,31	97,02
68	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.944	11.095	92,89
<b>3.07</b>	<b>Perindustrian</b>				
69	Pertumbuhan Industri	%	9,00	3,26	36,22
70	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	179,91	-2,43	-1,35
71	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	3,55		
<b>3.08</b>	<b>Transmigrasi</b>				
72	Cakupan Penempatan Transmigran	%	100		
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
73	Ranking Nasional LPPD	Ranking	3,0747		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
74	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00		
75	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100,00		
76	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	45,00		
77	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	4		
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>5.01</b>	<b>Perencanaan</b>				
78	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100
<b>5.02</b>	<b>Keuangan</b>				
79	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100
80	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,54		
81	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65	48,12	124,50
<b>5.03</b>	<b>Kepegawaian</b>				
82	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72		
<b>5.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>				
83	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,28		
<b>5.05</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				
84	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	30,00		
<b>5.06</b>	<b>Penghubung</b>				
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>6.01</b>	<b>Pengawasan</b>				
86	Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)		
<b>7</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>7.01</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				
87	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,89		
88	Partisipasi Politik Masyarakat	%	85,20		
89	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	50,00		
90	Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00		
91	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00		

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2022

Ket. NA= Not Available

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 19 indikator tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 8 indikator belum memenuhi target, dan masih terdapat 64 indikator belum tersedia (Not Available) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target yaitu Pertumbuhan

sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Balita Stunting, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kesehatan, Rata-rata Lama Sekolah, Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk, Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan, Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul), Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri, Harapan Lama Sekolah, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas), Nilai Tukar Petani, Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan, Opini BPK.

## **BAB V : PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2023 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Laporan evaluasi RKPD Triwulan III merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan III Tahun 2023. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.991.980.923.513.
3. Hasil capaian kinerja sampai Triwulan III tahun 2023 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah, rata-rata capaian kinerja sebesar 57,98 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.058.465.618.085 atau 51,04 persen. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena pekerjaan pada Triwulan III masih terfokus pada program kegiatan yang bersifat administratif, dan pembayaran hutang pada Tahun Anggaran 2022, serta adanya kebijakan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan perangkat daerah tahun anggaran 2023 yang pendanaannya bersumber dari dana bebas seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bebas dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan IV tahun anggaran 2023.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan

37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sampai Triwulan III Tahun 2023, terdapat 14 indikator atau 37,84 persen telah dapat diukur pencapaiannya dimana sebanyak 9 indikator atau 24,32 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2023, sedangkan 5 indikator atau 13,51 persen belum mencapai target. Sisanya sebanyak 23 indikator atau 62,16 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kapasitas Daerah, Rata rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Opini BPK.

5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023, dimana sebanyak 32 Indikator sudah dapat diukur pencapaiannya dengan 21 indikator atau 20,39 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 11 indikator atau 10,68 persen belum memenuhi target. Sisanya sebanyak 71 indikator atau 68,93 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

## 5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan serta menetapkan besaran target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan. Penjabaran ini perlu dilakukan pada saat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2023;
2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;

4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;
5. Terhadap target-target yang belum tercapai agar dilakukan pengawalan dan memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di tahun depan dapat diakselerasi;
6. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif dan berkala sehingga dapat mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

**CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
<b>Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah</b>														
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Point											
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,72		0,65	2.255.513.036	110,77		0,72		110,77		
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		Persentase terbentuknya DESTANA & SMAB	%	40,09	14.445.499.395	40,09	2.835.269.700	40,09	3.037.496.200		1.010.815.129		33,28	Pelaksana BPBD
		Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50		92,50		92,50						
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Tersusunnya Dokumen Perencanaan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang ditanggulangi	Dokumen	420	3.524.792.112	420	849.599.200	420	1.917.784.300		773.671.897		40,34	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	10	853.307.397	10	815.129.000	10	1.879.914.100		754.216.697		40,12	
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah dokumen verifikasi pasca bencana	Dokumen	100	354.723.830	100	34.470.200	100	37.870.200		19.455.200		51,37	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Kejadian Bencana Yang tertangani	%	100	4.179.305.283	100	1.959.429.200	100	1.079.966.200		222.691.932		20,62	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana	%	100	124.207.684	100	35.307.200	100	101.681.200		52.519.431		51,65	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	Orang	500	1.586.446.729	500	1.881.278.500	500	107.457.500		35.060.301		32,63	
		Persentase Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100		100		100						
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	500	2.468.650.870	500	42.843.500	500	870.827.500		135.112.200		15,52	
		Persentase Pendistribusian Logistik	%	100	129.970.171	100		100						
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	%	100	70.000.000	100	26.241.300	100	39.745.700		14.451.300			
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	59.970.171	1	26.241.300	1	39.745.700		14.451.300			
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>7.543.347.993</b>	<b>100</b>	<b>1.343.700.000</b>	<b>100</b>	<b>1.195.905.000</b>		<b>765.943.500</b>		<b>64,05</b>	<b>Dinas Sosial</b>
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Terlaksananya penanganan PMKS (korban bencana)	%	100		100	1.343.700.000	100	1.195.905.000		765.943.500			
	Penyediaan Perumahan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	1000		1000	300.000.000	1000	230.000.000		228.360.000		99,29	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	1000		1000	50.000.000	1000	-		-			
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	1000		1000	235.000.000	1000	188.000.000		-		-	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	1000		1000	287.600.000	1000	289.600.000		156.767.900		54,13	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	1000		1000	471.100.000	1000	488.305.000		380.815.600		77,99	
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan		Indeks Aksesibilitas	Point									0,00	44,69	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
<b>Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar</b>		<b>Persentase Kematapan jalan</b>	<b>%</b>	<b>85,36</b>	<b>85,36</b>	<b>86,60</b>	<b>138.902.122.352</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		<b>Persentase Jalan Mantap</b>	<b>km</b>	<b>22,5</b>	<b>931.804.007.968</b>	<b>22,5</b>	<b>181.490.766.000</b>	<b>22,5</b>	<b>145.503.062.027</b>		<b>113.338.401.732</b>		<b>77,89</b>	<b>Dinas PUPR</b>
Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Km	541		541	181.490.766.000	541	145.503.062.027		113.338.401.732		77,89	
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	%	87		87	150.000.000.000	87	81.654.894.452		80.962.817.852		99,15	
	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	%	87		87	14.496.551.800	87	16.089.841.700		6.588.529.571			
	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	%	87		87			536.059.000		536.059.000			
	Penggantian Jembatan	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	%	87		87	16.994.214.200	87	17.848.732.000		6.749.699.318	100	49,11	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala jalan	%	87		87	18.008.189.500	87	29.272.979.175		18.439.738.200	100	79,94	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						146.810.700		100.555.700		61.557.791		61,22	
												100,00	74,20	
<b>Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar</b>		<b>Persentase Kematapan Sistem Irigasi</b>	<b>%</b>	<b>54,50</b>		<b>54,50</b>	<b>146.894.637.594</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>		<b>Persentase kenaikan Areal Layanan Irigasi</b>	<b>%</b>	<b>76,28</b>	<b>342.401.082.017</b>	<b>76,28</b>	<b>135.767.379.250</b>	<b>76,28</b>	<b>152.427.487.650</b>		<b>80.161.648.059</b>		<b>52,59</b>	<b>Dinas PUPR</b>
		Cakupan Pelayanan Areal Irigasi		78		78		78						
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya ketersediaan Air Irigasi dan Air Baku	Lokasi	20		20	84.227.552.250	20	93.961.817.220		49.145.335.639			
		Jumlah SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Lokasi	90		90		90						
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						213.640.000		43.640.000		640.000		1,47	
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Tercapainya ketersediaan Air Irigasi dan Air Baku	%	76		76	16.097.590.000	76	16.320.247.500		5.500.438.700	-	33,70	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tercapainya ketersediaan Air Irigasi dan Air Baku	%	76		76	4.242.300.000	76	5.790.600.000		5.019.012.850	-	86,68	
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Tercapainya ketersediaan Air Irigasi dan Air Baku	%	76		76	18.688.045.000	76	21.177.568.500		10.574.388.250			
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi						154.207.250		144.867.250		84.570.250		58,38	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya						31.946.020.000		38.755.601.570		21.260.609.389		54,86	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola		78		78	12.885.750.000	78	11.729.292.400		6.705.676.200		57,17	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							51.539.827.000		58.465.670.430		31.016.312.420			
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						1.027.680.000		746.332.500		565.647.480		75,79	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						1.574.950.000		1.951.850.000		1.744.184.400		89,36	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						48.914.277.000		55.698.167.930		28.689.290.540		51,51	
	Operasional Unit Pengelola Irigasi						22.920.000		69.320.000		17.190.000			
												0,00	56,15	
<b>Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah</b>		<b>Persentase konektivitas transportasi publik</b>	<b>%</b>	<b>92,00</b>		<b>89,14</b>	<b>8.140.263.807</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		<b>Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>81.63 %</b>	<b>14.665.159.820</b>	<b>81.63 %</b>	<b>6.922.746.630</b>	<b>81.63 %</b>	<b>7.846.327.550</b>		<b>3.523.496.652</b>		<b>44,91</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>
		<b>Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>						



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan		
		Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40 %		40 %		40 %							
		Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58 %		52.58 %		52.58 %							
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi							5.960.000.000		6.807.004.000		2.916.085.600		-	42,84	
	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	1		1	5.960.000.000	1	6.807.004.000		2.916.085.600			42,84	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah fasilitas pengelolaan terminal yang memadai	Dokumen	8		8	36.424.000	8	36.424.000		32.295.000			88,66	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Dokumen Fasilitas terminal type B yang terpelihara	Unit	1		1	36.424.000	1	36.424.000		32.295.000			88,66	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Dokumen manajemen rekayasa Lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen	12		12	684.941.100	12	666.837.100		420.215.452			63,02	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	laporan	3		3	430.078.100	3	475.974.100		324.097.152			68,09	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	laporan	60		60	254.863.000	60	190.863.000		96.118.300			50,36	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	Unit	90		90	26.171.000	90	26.171.000		3.745.000			14,31	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	laporan	9		9	26.171.000	9	26.171.000		3.745.000			14,31	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	400		400	140.046.630	400	234.727.550		98.953.600			42,16	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	200		200	140.046.630	200	234.727.550		98.953.600			42,16	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	KPS	200		200	75.163.900	200	75.163.900		52.202.000			69,45	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	150		150	75.163.900	150	75.163.900		52.202.000			69,45	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>		<b>Persentase Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>66,06</b>	<b>2.260.753.150</b>	<b>66,06</b>	<b>200.987.800</b>	<b>66,06</b>	<b>450.987.800</b>		<b>275.057.985</b>			<b>60,99</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22		22	80.736.600	22	80.736.600		63.986.968			79,25	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	laporan	22		22	80.736.600	22	80.736.600		63.986.968			79,25	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122		122	60.923.200	122	60.923.200		57.933.600		95,09	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	laporan	122		122	60.923.200	122	60.923.200		57.933.600		95,09	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah pelabuhan yang diawasi	Pelabuhan	5		5	59.328.000	5	309.328.000		153.137.417		49,51	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	laporan	5		5	59.328.000	5	309.328.000		153.137.417		49,51	
													59,52	
<b>Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi</b>														
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point											
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Opini BPK	Status	WTP		WTP	1.129.533.684.675	100,00		WTP		100,00		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2.275.817.467.798,74	100	1.123.639.691.890	100	1.062.784.434.233	53,20	558.962.253.463	53,20	52,59	BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Rencana Anggaran Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	108.390.241	100	2.293.851.400	100	3.474.325.300	65,52	2.053.433.752	65,52	59,10	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	111.695.293	1	102.349.000	1	102.278.500	1	-	100,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen	1	121.488.403	1	74.391.000	1	77.990.600	1,00	77.815.600	100,00	99,78	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen	136	67.571.827	136	138.635.500	136	30.677.000	136	-	100,00	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen	136	37.084.236	136	42.592.400	136	20.097.400	136,00	10.222.400	100,00	50,86	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen	136	1.084.814.840	136	18.679.800	136	10.495.500	268	7.364.800	197,06	70,17	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen	136	346.406.048	136	69.702.800	136	4.567.800	136	4.567.800	100,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	103.855.815	2	557.556.900	2	694.703.900	2,00	192.346.300	100,00	27,69	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen	2	331.115.036	2	401.770.400	2	755.654.400	2,00	481.834.738	100,00	63,76	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang Tersusun	Dokumen	1	1.181.608.107	1	743.623.600	1	1.685.369.400	1,00	1.279.282.114	100,00	75,91	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Rapat Terselenggara	Orang	37	129.954.691	37	144.550.000	37	92.490.800	4	-	10,81	-	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketepatan Waktu tindak lanjut Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota Sesuai Ketentuan	%	100	221.651.109	100	855.128.200	100	1.050.128.300	31,00	600.676.165	31,00	57,20	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Dokumen	10	223.956.257	10	155.366.300	10	272.723.800	10,00	132.416.400	100,00	48,55	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota	Dokumen	10	216.298.222	10	154.416.500	10	210.437.500	10,00	72.720.205	100,00	34,56	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Dokumen	10	1.082.652.109	10	157.596.500	10	107.736.500	10,00	107.726.500	100,00	99,99	
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil asistensi	Dokumen	10	636.639	10	86.417.000	10	80.417.000	10,00	80.417.000	100,00	100,00	
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Keuangan yang terlaksana	laporan	1	15.810.269	1	121.400.200	1	225.685.400	1,00	73.128.760	100,00	32,40	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di	Dokumen	2	5.032.801	2	179.931.700	2	153.128.100	11,00	134.267.300	550,00	87,68	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB Sesuai Ketentuan	%	17	1.503.948.100	4	1.503.948.100	100	1.503.948.100	17,00	544.427.928	17,00	36,20	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Dokumen	1	160.572.300	2	160.572.300	136	160.572.300	1,00	97.200.252	0,74	60,53	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen BA Rekonsiliasi	laporan	17	77.954.100	1	77.954.100	17	77.954.100	17,00	2.806.800	100,00	3,60	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, Semesteran	Dokumen	136	764.474.400	136	764.474.400	136	731.663.900	136,00	395.279.476	100,00	54,02	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di Konsolidasikan	Dokumen	2	344.089.000	136	344.089.000	2	365.868.500	2,00	49.141.400	100,00	13,43	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen	1	47.907.500,00	2	47.907.500	1	51.823.500	1,00	-	100,00	-	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen	1	50.412.100,00	1	50.412.100	1	57.527.100	1,00	-	100,00	-	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Regulasi terkait Juknit Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Orang	20	58.538.700,00	1	58.538.700	30	58.538.700	20,00	-	66,67	-	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat Ketepatan Waku Penyusunan Dokumen Laporan Dana Bagi Hasil dan Bantuan tidak terduga	%	100	59.956.019,56	100	1.119.371.624.734	100	1.055.300.747.533	1	554.908.495.857	1,00	52,58	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	laporan	1	228.996.840,91	1	55.321.837.234	1	36.321.837.234	1	2.063.861.878	100,00	5,68	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	1	229.426.315,48	1	2.358.087.500	1	19.683.520.800	-	-	-	-	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan	1	74.315.643,52	1	54.360.000.000	1	3.552.889.499	388.240.173		10,93		
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	laporan	1	43.174.143,94	1	1.007.331.700.000	1	995.742.500.000	552.456.393.806		-	55,48	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Pemahaman ASN Pemprov terhadap SIPD	%	75	27.826.982,54	75	970.455.500	75	642.559.700	301.914.200	3	4,00	46,99	
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	39.929.186,62	2	111.397.900	2	185.482.400	69.239.860	2	100,00	37,33	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	96.487.718,11	1	141.659.000	1	184.235.500	100.235.740	1	100,00	54,41	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	orang	36	880.447.395.195,38	36	717.398.600	36	272.841.800	132.438.600	4	11,11	48,54	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>Persentase Pengelolaan BMD pada PD yang Akurat dan Akuntabel</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>5.688.570.834</b>	<b>75</b>	<b>2.634.772.400</b>	<b>75</b>	<b>4.026.476.616</b>	<b>1.983.298.008</b>	<b>59</b>	<b>78,67</b>	<b>49,26</b>	<b>BPKAD</b>
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD Perangkat yang diterima	Dokumen	59	1.708.260.527,66	59	2.634.772.400	59	4.026.476.616	1.983.298.008	59	100,00	49,26	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	Dokumen	1	38.161.983,07	1	116.140.900	1	104.390.900	75.377.874	1	100,00	72,21	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	42.785.041,36	2	30.988.800	2	52.738.800	27.437.322	2	100,00	52,02	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	125.034.874,95	1	71.462.600	1	71.462.600	54.862.600	1	100,00	76,77	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	27.913.527,12	3	35.545.000	3	35.545.000	33.545.000	3	100,00	94,37	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	laporan	160	566.211.529,66	160	488.282.800	160	586.286.300	332.672.304	160	100,00	56,74	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Inventarisasi yang dilaksanakan	laporan	12	62.102.116,30	12	406.956.200	12	374.866.200	88.786.200	12	100,00	23,68	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah penanganan sengketa aset daerah	Kegiatan			50	824.985.000	50	740.910.000	233.981.200	5	10,00	31,58	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	5	432.134.022,29	5	51.260.000	5	51.260.000	4.780.000	5	100,00	9,33	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Status Aset	laporan	1	56.549.805,89	1	69.795.000	1	54.795.000	795.000	1	100,00	1,45	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD, Jumlah Persetujuan Gubernur Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD, Jumlah SK Penghapusan BMD	surat keputusan, dokumen	0	58.742.423,25	0	1.678.218.116	34	1.765.734.116	1.034.833.482	10	29,41	58,61	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	Dokumen	136	113.375.719,60	136	54.321.600	136	125.347.900	51.579.000	132	97,06	41,15	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Dokumen	48		48	43.282.700	48	48.050.000	37.250.000	48	100,00	77,52	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota	Dokumen	136		136	56.089.800	136	15.089.800	7.398.026	10	7,35	49,03	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.807.331.659</b>	<b>100</b>	<b>1.275.395.500</b>	<b>100</b>	<b>1.598.994.380</b>	<b>1.213.892.580</b>			<b>75,92</b>	<b>INSPEKTORAT</b>
		<b>Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>48,89</b>		<b>48,89</b>		<b>48,89</b>						
		<b>Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>2.399.067.769</b>	<b>90</b>		<b>90</b>						
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah yang bebas temuan keuangan materil	Persen	100	1.500.347.625	100	1.144.339.500	100	1.497.938.380	1.125.822.580			75,16	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	62		62	40.678.000	62	40.678.000	38.205.000			93,92	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	39	157.566.277	39	830.303.000	39	1.029.022.400		738.929.600		71,81	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	8	202.077.047	8	50.471.000	8	50.471.000		30.750.000		60,93	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	16	432.386.126	16	85.619.500	16	85.619.500		61.838.500		72,22	
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	laporan	23		23	870	23	870.000		-		-	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1		1	20.870.000	1	145.749.480		144.879.480		99,40	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	5		5	115.528.000	5	145.528.000		111.220.000		76,43	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan	laporan	25		25	131.056.000	25	101.056.000		88.070.000		87,15	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	4	225.468.766	4	45.528.000	4	15.528.000		14.160.000		91,19	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	laporan	21	22.185.177.455	21	85.528.000	21	85.528.000		73.910.000		86,42	
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM</b>	%	<b>26,66</b>	<b>225.468.766</b>	<b>26,66</b>	<b>419.400.000</b>	<b>26,66</b>	<b>651.893.000</b>		<b>416.768.690</b>		<b>63,93</b>	<b>INSPEKTORAT</b>
		<b>Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP</b>	%	<b>7,55</b>	<b>225.468.766</b>	<b>7,55</b>		<b>7,55</b>						
		<b>Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu</b>	%	<b>97</b>	<b>225.468.766</b>	<b>97</b>		<b>97</b>						
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				22.185.177.455		30.585.000		55.585.000		28.980.000		52,14	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	13	5.541.790.927	13	30.585.000	13	55.585.000		28.980.000		52,14	
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi	Dokumen	4		4	388.815.000	4	596.308.000		387.788.690		65,03	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	46		46	250.585.000	46	250.585.000		198.091.570		79,05	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	2	5.541.790.927	2	10.835.000	2	10.828.000		9.180.000		84,78	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	11		11	116.810.000	11	314.310.000		179.212.120		57,02	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	2		2	10.585.000	2	20.585.000		1.305.000		6,34	
												86,61	50,37	
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD</b>	%	<b>43,18</b>		<b>38,65</b>	<b>1.130.460.974.532</b>	<b>124,50</b>		<b>48,12</b>		<b>124,50</b>		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>Derajat Desentralisasi Fiskal</b>	%	<b>38,44</b>	<b>1.667.730.000</b>	<b>38,44</b>	<b>184.560.000</b>	<b>38,44</b>	<b>189.060.000</b>		<b>58.106.416</b>		30,73	<b>Bappenda</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%	4,79		4,79	121.105.000	4,79	121.105.000		41.141.802		33,97	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Rencana Target Pendapatan Daerah	Dokumen	2		2	121.105.000	2	121.105.000		41.141.802		33,97	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	%	60,54		60,54	63.455.000	60,54	67.955.000		16.964.614		24,96	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar	3636		3636	63.455.000	3636	67.955.000		16.964.614		24,96	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)</b>	%	<b>54,03</b>	<b>46.183.810.000</b>	<b>54,03</b>	<b>2.084.050.000</b>	<b>54,03</b>	<b>8.914.188.600</b>	<b>50,19</b>	<b>5.226.952.322</b>	92,89	<b>58,64</b>	<b>Bappenda</b>
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	9,59		9,59	2.084.050.000	9,59	8.914.188.600	35,97	5.226.952.322	375,08	58,64	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Target pendapatan pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rp	5		5	382.000.000	2032,21	327.500.000	333,09	149.837.840	16,39	45,75	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Perjanjian Kerjasama (PKS) pengembangan layanan kesamsatan yang ditindaklanjuti	MoU	2		2	182.010.000	5	267.505.000	1	106.356.852	20,00	39,76	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
		Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya	Draft					10		3		30,00		
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan dan badan	Persen	10		10	126.565.000	66,86	273.665.000	11,45	167.257.960	17,13		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tingkat gangguan perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi yang direduksi	Persen	26		26	520.405.000	98,9	1.150.520.500	97,55	760.821.054	98,63	66,13	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data Obyek Pajak Daerah (DU & TMDU PKB, Wapu PBBKB, dan PAP) yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek	3		3	400.200.000	1126416	1.493.330.000	210374	436.585.713	18,68	29,24	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah record data yang disinkronkan dalam database	Obyek	3		3	89.975.000	1800000	153.875.000	236840	97.200.000	13,16	63,17	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek	1		1	1.325.000	98141	1.767.525.000	26466	1.225.990.000	26,97	69,36	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Angka partisipasi Wajib Pajak yang menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotornya	Persen	12		12	86.475.000	31,2	188.982.000	18,68	176.416.170	59,87	93,35	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP Penunggak Pajak yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek	12		12	21.250.000	351481	21.250.000	34640	19.063.000	9,86	89,71	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP penerima Surat Teguran PKB dan Penagihan Pajak Daerah yang melunasi tunggakan PKBnya	Obyek	2		2	22.610.000	40200	648.876.100	11099	373.185.000	27,61		
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus	1		1	1.555.000	3	1.555.000	0	-	-		
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	WP Terjaring Operasi Sadar PKB yang menyelesaikan kewajiban/ tunggakan PKBnya	Obyek	8		8	67.500.000	27409	2.392.425.000	4611	1.596.011.090	16,82	66,71	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah penerimaan Dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain	Milyar Rp	2		2	182.180.000	917,76	227.180.000	143,84	118.227.643	15,67		
												52,42	51,82	
<b>Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>		<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Kategori</b>	<b>BB</b>		<b>A (80,01 - 90,00)</b>	<b>11.514.506.543</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>14.444.339.884</b>	<b>100</b>	<b>2.113.051.100</b>	<b>100</b>	<b>1.851.080.900</b>		<b>1.262.046.839</b>		<b>68,18</b>	<b>Bappeda</b>
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan & pendanaan pembangunan daerah	Dokumen	10		10	1.402.141.000	10	1.260.126.200		948.543.008		75,27	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3		3	56.375.000	3	30.580.151		9.455.000		30,92	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2		2	186.890.000	2	107.200.000		95.758.079		89,33	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1		1	13.950.000	1	64.200.000		64.200.000		100,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1		1	129.800.000	1	222.075.000		73.550.000		33,12	
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	1		1	829.908.000	1	660.318.349		660.243.249		99,99	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2		2	185.218.000	2	175.752.700		45.336.680		25,80	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Hasil Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5		5	508.210.000	5	448.125.000		276.890.589		61,79	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	3		3	150.220.000	3	112.385.000		55.760.000		49,62	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	50		50	187.740.000	50	184.690.000		150.529.477		81,50	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	400		400	170.250.000	400	151.050.000		70.601.112		46,74	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	19		19	202.700.100	19	142.829.700		36.613.242		25,63	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	2		2	43.200.000	2	13.200.000		8.600.000		65,15	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja sama	1		1	14.850.000	1	12.400.000		-		-	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	14		14	113.950.100	14	107.700.100		25.413.242		23,60	
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	2		2	30.700.000	2	9.529.600		2.600.000		27,28	
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKP</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>37.833.084.161</b>	<b>100</b>	<b>8.136.508.700</b>	<b>100</b>	<b>8.388.633.300</b>		<b>4.580.571.226</b>		<b>54,60</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	3		3	1.475.405.700	3	1.519.048.300		814.249.805		53,60	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Dokumen	2		2	20.838.100	2	21.471.400		4.000.000		18,63	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	12		12	10.000.000	12	10.000.000		2.500.000		25,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	12		12	15.000.000	12	85.000.000		35.010.000		41,19	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1		1	14.290.000	1	14.800.000		-		-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Dokumen	4		4	167.518.800	4	145.736.900		4.500.000		3,09	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	13		13	35.700.000	13	35.700.000		10.250.000		28,71	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	13		13	54.000.000	13	95.000.000		66.229.805		69,72	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2		2	1.158.058.800	2	1.111.340.000		691.760.000		62,25	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	3		3	5.947.385.000	3	6.097.047.000		3.442.400.523		56,46	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Dokumen	5		5	73.565.000	5	43.565.000		5.585.000		12,82	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	11		11	42.520.000	11	42.520.000		2.850.000		6,70	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	11		11	188.872.700	11	292.172.700		134.057.255		45,88	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	3		3	937.362.100	3	1.015.068.300		342.589.320		33,75	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Dokumen	2		2	31.750.000	2	23.750.000		3.500.000		14,74	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	6		6	10.000.000	6	10.000.000		8.270.000		82,70	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	6		6	1.849.433.000	6	1.883.088.000		851.573.004		45,22	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2		2	2.813.882.200	2	2.786.883.000		2.093.975.944		75,14	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Dokumen	3		3	713.718.000	3	772.538.000		323.920.898		41,93	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4		4	62.650.000	4	27.650.000		23.080.000		83,47	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	6		6	6.600.000	6	6.600.000		4.350.000		65,91	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	6		6	36.550.000	6	89.050.000		88.824.363		99,75	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2		2	8.050.000	2	8.050.000		3.500.000		43,48	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2		2	60.700.000	2	25.700.000		9.630.000		37,47	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2		2	6.600.000	2	6.600.000		3.850.000		58,33	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2		2	39.600.000	2	91.600.000		23.807.281		25,99	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1		1	492.968.000	1	517.288.000		166.879.254		32,26	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN</b>		<b>Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya</b>	%	<b>91,11</b>	<b>333.276.875</b>	<b>91,11</b>		<b>91,11</b>						<b>INSPEKTORAT</b>
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>Persentase PD yang menerapkan Zi menuju WBK/WBBM</b>	%	<b>22,22</b>	<b>95.465.459</b>	<b>22,22</b>		<b>22,22</b>						<b>INSPEKTORAT</b>
<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>		<b>Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat</b>	%	<b>100</b>	<b>2.486.608.796</b>	<b>100</b>	<b>849.986.300</b>	<b>100</b>	<b>782.986.300</b>		<b>663.399.419</b>		<b>84,73</b>	<b>Biro Organisasi</b>
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		dokumen fasilitasi PD, UPTD/UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal, Dokumen fasilitasi Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota, Dokumen Anjab, Ejab dan ABK, Dokumen Jabatan Struktural	Dokumen	100	1.355.820.752	100	283.307.300	100	283.307.300	100	270.568.944	100	95,50	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen UPTD/UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi	Dokumen	6	585.175.408	6	119.435.700	6	119.435.700	6	116.428.682	100	97,48	
		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen	22	282.231.024	22								
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Dokumen	3, 43	488.414.320	3, 43	44.435.800	22	44.435.800	22	44.335.400	100	99,77	
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Analisis Beban Kerja yang tersusun	Dokumen	100	2.486.608.796	100	<b>119.435.800</b>	3,43	119.435.800	3,43	109.804.862	100	91,94	
		Jumlah dokumen jabatan struktural yang tersusun	Dokumen	22	642.679.825									
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SAKIP sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%	43, 43	614.220.839	43, 43	<b>566.679.000</b>		499.679.000		392.830.475			
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan difasilitasi Pelaksanaan PMPRB	kab/Kota	1	267.573.765	1	<b>69.435.800</b>		134.183.853		68.598.347			



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)		
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan				
		Jumlah Perangkat Daerah yang dibina Pelaksanaan PMPRB	OPD	43	243.208.989	43									
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil penilaian kinerja perangkat daerah	Dokumen	48	718.925.378	48		173.485.800		122.769.847		112.131.440			
		Jumlah laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	Laporan					40.385.800		26.353.700		33.935.800			
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan fasilitasi dan evaluasi perangkat daerah/unit kerja penerapan budaya kerja	Laporan					104.435.800		104.435.800		97.673.047			
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP tata kelola pemerintahan	OPD					178.935.800		111.935.800		80.491.841			
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan	Inovasi												
		Jumlah unit kerja pelayanan publik yang terbina sesuai standar pelayanan	OPD												
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>		<b>Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>9.485.035.504</b>	<b>100</b>	<b>563.997.200</b>	<b>100</b>	<b>885.347.200</b>	<b>100</b>	<b>482.072.807</b>	<b>100</b>	<b>54,45</b>	<b>Biro Pemerintahan</b>	
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Cakupan pelaksanaan tugas pemerintahan	%	100	2.778.249.878	100	135.745.700	100	135.745.700	3	106.667.008	3,00	78,58		
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	794.553.356	100	10.000.200	100	10.000.200	0	9.474.000	-	94,74		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	0	720.804.546	0		0							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	1	1.262.891.976	1		1							
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	1	4.928.610.306	1	50.745.500	1	50.745.500	0	42.054.198	-	82,87		
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	1	1.933.929.071	1	75.000.000	1	75.000.000	0	55.138.810	-	73,52		
Pelaksanaan Otonomi Daerah		Cakupan pelaksanaan otonomi daerah	%	100	652.721.357	100	305.486.500	100	516.836.500	1	262.069.300	1,00	50,71		
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	1	2.341.959.878	1	80.121.000	1	291.471.000	0	74.643.960	-	25,61		
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1.778.175.320	1	50.340.000	1	50.340.000	0	26.487.600	-	52,62		
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	2	763.762.649	2	175.025.500	2	175.025.500	1	160.937.740	50,00	91,95		
Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase kerjasama daerah yang diselesaikan sampai penandatanganan dokumen kerjasama	%	100		100	122.765.000	100	232.765.000	0	113.336.499	-			
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	10		10	65.000.000	10	175.000.000	6	62.993.589	60,00			
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	10		10	32.000.000	10	32.000.000	3	26.897.910	30,00			
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	15		15	25.765.000	15	25.765.000	4	23.445.000	26,67			
												43,38	54,19		
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN</b>		<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>	<b>Point</b>	<b>0,64</b>		<b>0,72</b>	<b>5.715.433.455</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan</b>	<b>Nilai</b>	<b>134</b>	<b>7.425.595.246</b>	<b>134</b>	<b>1.271.225.000</b>	<b>134</b>	<b>1.631.705.000</b>		<b>944.864.283</b>		<b>57,91</b>	<b>BKD</b>	
		<b>Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>115</b>	<b>2.947.141.919,00</b>	<b>115</b>		<b>115</b>							
		<b>Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>	<b>1.904.365.497,00</b>	<b>80</b>		<b>80</b>							
		<b>Nilai Aspek Sistem Informasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>19</b>	<b>264.809.478,00</b>	<b>19</b>		<b>19</b>							
		<b>Nilai Penerapan Sistem Merit</b>	<b>Point</b>	<b>373</b>	<b>-</b>	<b>373</b>		<b>373</b>							
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi	Point	102	777.966.944,00	102	495.855.000	102	672.335.000		298.683.583		44,42		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/PPK terseleksi	Orang	400	3.492.141.693,00	400	283.105.000	400	459.585.000		226.521.000		49,29		
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	0	365.757.991,00	0		0							
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	0	1.037.953.669,00	0	31.080.000	0	31.080.000		14.550.000		46,81		
		Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	SK	245	2.088.430.033,00	245		245							

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Kinerja (%)	Keuangan (%)	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan fasilitasi KORPRI	Kegiatan	4	479.038.537,00	4	62.550.000	4	62.550.000		36.392.583		58,18	
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0		0		0						
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	Pegawai	14143	16.465.825,00	14143	119.120.000	14143	119.120.000		21.220.000		17,81	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	92.884.590,00	0		0						
Mutasi dan Promosi ASN		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Point	32,5	47.781.226,00	32,5	446.070.000	32,5	499.270.000		347.207.000		69,54	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	0	200.189.778,00	0	69.110.000	0	69.110.000		48.112.000		69,62	
		Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	SK	230	121.717.118,00	230		230						
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat/gaji berkala	SK	3000	507.273.097,00	3000	108.500.000	3000	138.500.000		72.898.000		52,63	
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	0		0		0						
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	0	166.530.163,00	0	268.460.000	0	291.660.000		226.197.000		77,56	
		Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam jabatan struktural	SK	400	97.070.376,00	400		400						
Pengembangan Kompetensi ASN		Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan	Point	373	243.672.558,00	373	142.460.000	373	273.260.000		207.351.200		75,88	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	0		0	34.800.000	0	130.800.000		129.491.200		99,00	
		Jumlah SPT, Surat rekomendasi, surat ijin mengikuti diklat dan sertifikasi	Pegawai	100		100		100						
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	0		0	27.900.000	0	34.800.000		15.050.000		43,25	
		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat jafung dan uji kompetensi	Orang	20		20		20						
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	0		0	79.760.000	0	79.760.000		47.460.000		59,50	
		Jumlah keputusan pengangkatan penyesuaian dan pembebasan/pemberhentian dalam jabatan fungsional	SK	440		440		440						
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Point	120		120	186.840.000	120	186.840.000		91.622.500		49,04	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	0		0	91.500.000	0	91.500.000		40.550.000		44,32	
		Jumlah PNS yang berkinerja baik	Pegawai	12893		12893		12893						
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	0		0	28.590.000	0	28.590.000		7.275.000		25,45	
		Jumlah pns yang diberikan penghargaan pegawai teladan	Orang	24		24		24						
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	0		0	66.750.000	0	66.750.000		43.797.500		65,61	
		Jumlah pembinaan disiplin ASN	OPD	46		46		46						
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial</b>	%	<b>0,103</b>	<b>51.655.240.040</b>	<b>0,097</b>	<b>4.319.157.300</b>	<b>0,097</b>	<b>3.048.398.300</b>	<b>0,140</b>	<b>1.437.319.239</b>	<b>144,29</b>	<b>47,15</b>	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
		<b>Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional</b>	%	<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>0,037</b>		<b>0,020</b>		<b>53,44</b>		
		<b>Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis</b>	%	<b>0,146</b>		<b>0,146</b>		<b>0,146</b>		<b>0,030</b>		<b>20,61</b>		
		<b>Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi</b>	%	<b>0,620</b>		<b>0,620</b>		<b>0,620</b>		<b>0,000</b>		<b>-</b>		
Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Kompetensi Teknis ASN	Orang	630	248.451.557	630	449.847.200	387	449.847.200	200	194.942.744	51,68	43,34	
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	9		9		9		9		100,00		
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	3	188.076.443	2	91.566.800	3	91.566.800	1	45.368.264	33,33	49,55	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	3	402.271.578	2	31.994.300	3	31.994.300	0	15.135.900	-	47,31	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	630		387	301.286.100	200	301.286.100		110.587.320	-	36,71	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	3	132.057.743	1	25.000.000	3	25.000.000	0	23.851.260	-	95,41	
		Persentase tercapainya pembinaan dan pengendalian pengembangan kompetensi teknis & Persentase hasil evaluasi pasca pengembangan kompetensi teknis yang tervalidasi dan ditindaklanjuti	%	100	392.098.238	100		100		0		-		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	org	1290,576	671.037.778	159	3.869.310.100	159	2.598.551.100	40	1.242.376.495	25,16	47,81	
		Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	org	480		120		120		0				
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	dok	66		30		30		1				
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	dok	3	1.542.322.946	4	25.000.000	4	25.000.000	0	-	-	-	
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	dok	6,00	164.865.900	4,00	59.170.400	4,00	59.170.400	0	13.713.200	-	23,18	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi yang Tersertifikasi	org	480	188.076.443	120	131.916.100	120	131.916.100	0	61.575.920	-	46,68	
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	dok	9,00	119.906.585	4,00	458.919.500	4,00	747.654.600	1	366.716.959	25,00	49,05	
	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	dok	30,00		10,00	81.400.000	10,00	134.410.000		60.600.076		45,09	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	dok	12,00		4,00	25.000.000	4,00	25.000.000		-		-	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	org	3.864,00		159,00	2.987.904.100	159,00	1.345.400.000	40	676.491.280	25,16	50,28	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	dok	12,00		4,00	100.000.000	4,00	130.000.000		63.279.060		48,68	
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	Point	3,71		4,55	12.577.307.987	0,00		0,00		28,34	51,22	
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk</b>	%	<b>98,90</b>		<b>98,90</b>	<b>120.107.000</b>	<b>98,90</b>	<b>148.107.000</b>	<b>96,37</b>	<b>65.892.700</b>	97,44	44,49	DPMDes Dukcapil
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Pesentase penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	%	100	110.660.111	100	120.107.000	100	148.107.000	11,62	65.892.700	11,62	44,49	
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Kali	33	82.164.000	33	88.827.000	33	88.827.000	0	38.087.000			
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Berat Dokumen/barang yang dikirim	Kg	500	28.496.111	782	31.280.000	782	59.280.000	532,6	27.805.700	68,11	46,91	
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil</b>	%	<b>100</b>	<b>85.820.600</b>	<b>100</b>	<b>92.827.000</b>	<b>100</b>	<b>92.827.000</b>	<b>97,67</b>	<b>51.524.875</b>	97,67	55,51	DPMDes Dukcapil
Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil dan pendukungnya	Dokumen	1	85.820.600	1	92.827.000	10	92.827.000	10	51.524.875	100,00	55,51	
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Rakor di bidang pencatatan sipil	Orang	40	85.820.600	40	92.827.000	17	92.827.000	17	51.524.875	100,00	55,51	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase pengelolaan informasi data administrasi kependudukan yang baik di tingkat kab/kota</b>	%	<b>100</b>	<b>182.010.364</b>	<b>100</b>	<b>157.585.000</b>	<b>100</b>	<b>79.585.000</b>	<b>9,46</b>	<b>28.118.941</b>	9,46	35,33	DPMDes Dukcapil
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	kali	10	182.010.364	10	81.758.000	4	3.758.000	0	-	-	-	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Berat Dokumen/Barang yang dikirim	Kg	1	12.562.083	1	78.000.000	782		0		-		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah jenis Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis	1	169.448.281	1	3.758.000	3	3.758.000	0		-		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	10		10	75.827.000	100	75.827.000	19,650	28.118.941	19,65		
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tahun	1	195.198.365	1	75.827.000	1	75.827.000	0,197	28.118.941	19,65	37,08	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>		<b>Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir</b>	%	<b>25</b>	<b>119.143.303</b>	<b>25</b>	<b>200.000.000</b>	<b>20</b>	<b>200.000.000</b>	<b>11,5</b>	<b>106.938.020</b>	57,50	53,47	DPMDes Dukcapil
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kali	435	119.143.303	435	200.000.000	3	200.000.000	1	106.938.020	33,33	53,47	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	FGD Pengembangan Kerjasama Potensi Unggulan Desa	Kabupaten	1	31.689.519	1	55.000.000	4	55.000.000	0	3.365.000	-	6,12	
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	BIMTEK Kerjasama Desa Provinsi NTB	Orang	1	31.689.519	1	45.000.000	56	45.000.000	0	16.912.060	-	37,58	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	FGD Pengembangan Kawasan Perdesaan	Kabupaten	1	55.764.265	1	100.000.000	4	100.000.000	0	86.660.960	-	86,66	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)</b>	%	<b>80</b>	<b>16.947.033.421</b>	<b>80</b>	<b>6.554.447.140</b>	<b>80</b>	<b>7.780.670.840</b>		<b>5.320.033.912</b>		<b>68,38</b>	Diskominfotik

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	%	85	6.702.957.548	85	6.554.447.140	85	7.780.670.840		5.320.033.912		68,38	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	2	361.052.338	2	246.944.300	2	246.937.300		169.066.084		68,47	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	0	1.587.444.652	0	1.513.100.000	0	3.082.039.000		1.453.515.485		47,16	
		Jumlah Informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik (Informasi)	Informasi	806	114.738.050	806		806						
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	0	36.081.131	0	83.057.000	0	168.593.900		70.026.000			
		Jumlah informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah (Informasi)	Informasi	690	109.720.279	690		690						
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	0	1.551.207.649	0	12.000.000	0	22.000.000		11.500.000		52,27	
		Jumlah Lembaga dan Pers yang terlibat dalam penyebarluasan informasi (Lembaga/Pers)	Lembaga/Pers	5	2.509.787.788	5		5			-			
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang terlatih dan terfasilitasi (Aparatur/Orang)	Aparatur/Orang	40	432.925.661	40	57	40						
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0		0		0						
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	0		0	1.229.231.840	0	1.343.486.640		1.088.526.343		81,02	
		Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan (Kasus)	Kasus	2		2		2						
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	0		0	3.470.000.000	0	2.830.114.000		2.500.000.000		88,34	
		jumlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam penyebarluasan informasi (Komunitas)	Komunitas	15		15		15						
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Unit	0		0	57	0	87.500.000		27.400.000			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik (Unit)	Unit	10		10		10						
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Persentase Layanan Berbasis TIK (%)</b>	<b>%</b>	<b>65</b>	<b>6.229.379.686</b>	<b>65</b>	<b>3.021.449.700</b>	<b>65</b>	<b>2.024.339.300</b>		<b>830.436.781</b>		<b>41,02</b>	<b>Diskominfotik</b>
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					2.463.868.840		3.021.449.700		2.024.339.300		830.436.781	100,00	41,02	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	2	634.750.115	2	130.720.000	2	155.720.000		66.450.126		42,67	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data (OPD)	OPD	46	1.185.635.464	46	2.181.129.700	46	1.674.019.300		677.586.655		40,48	
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	0	539.633.718	0		0						
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	0	103.849.543	0	644.600.000	0	129.600.000		86.400.000		66,67	
		Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi (OPD)	OPD	30		30		30						
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	0		0	65.000.000	0	65.000.000		-			
		Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan (aplikasi)	Aplikasi	3		3		3						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)</b>	<b>%</b>	<b>30</b>	<b>1.530.744.809</b>	<b>30</b>	<b>200.000.000</b>	<b>30</b>	<b>225.000.000</b>	<b>46</b>	<b>108.026.975</b>	<b>153,33</b>	<b>48,01</b>	<b>Diskominfotik</b>
Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Data yang Tervalidasi (%)	%	65	605.446.229	65	200.000.000	65	225.000.000	46	108.026.975	70,77	48,01	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Jumlah Jenis Data Yang Tersedia (jenis)	Jenis	550	54.019.082	550	40.214.800	550	60.514.800		25.774.086		42,59	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman (aparatur/orang)	Aparatur/Orang	55	377.189.970	55	28.535.800	55	21.785.800		8.716.470		40,01	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan		
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	0	26.548.709	0		0							
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	0	31.506.296	0	31.893.600	0	30.343.600			19.905.819		65,60	
		Jumlah Metadata yang terbangun (jenis)	Jenis	20	116.182.172	20		20							
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	0		0	28.358.600	0	20.858.600			8.160.600			
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (OPD)	OPD	46		46		46							
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	0		0	70.997.200	0	91.497.200			45.470.000		49,70	
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi statistik (OPD)	OPD	7		7		7							
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)</b>	%	<b>50</b>	<b>1.492.430.577</b>	<b>50</b>	<b>177.001.000</b>	<b>50</b>	<b>177.001.000</b>			<b>77.317.388</b>		<b>43,68</b>	<b>Diskominfotik</b>
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%	50	387.276.530	50	87.421.000	50	87.421.000	86		3.810.000	172,00	4,36	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Dokumen	1	47.577.621	1	56.000.000	1	56.000.000			-		-	
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	0	219.127.137	0		0							
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	0	93.443.123	0	8.618.600	0	8.618.600			2.735.000		31,73	
		Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	Orang	5	27.128.649	5		5							
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	0	105.862.015	0	2.302.400	0	2.302.400			1.075.000		46,69	
		Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah (insiden)	insiden	14	105.862.015	14		14							
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Perangkat Daerah	OPD	46		46	20.500.000	46	20.500.000			-		-	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	0		0		0							
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi						89.580.000	100	89.580.000	15		73.507.388	15,00	82,06	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Komunikasi Sandi	OPD	46		46	89.580.000	46	89.580.000			73.507.388		82,06	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	OPD	0		0		0							
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>300.351.716</b>	<b>90</b>	<b>70.975.200</b>	<b>90</b>	<b>70.975.200</b>	<b>100</b>		<b>50.781.400</b>	111,11	71,55	<b>Dsinakertrans</b>
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	dokumen	2	300.351.716	2	70.975.200	2	70.975.200	1		50.781.400	50,00	71,55	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	Dokumen	1	244.705.400	1	70.975.200	1	70.975.200	1		50.781.400	100,00	71,55	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang di hasilkan		1		1		1		0					
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.293.706.035</b>	<b>100</b>	<b>1.085.528.411</b>	<b>100</b>	<b>929.324.211</b>	<b>100</b>		<b>486.142.071</b>	100,00	52,31	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan (Perpustakaan)	Orang	225	1.102.657.588	50	918.516.711	50	764.194.711	50		433.834.271	100,00	56,77	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik (Kunjungan)	Jumlah kunjungan pemustaka (Kunjungan)	Perpustakaan	192.000	169.517.257	37.000	125.000.011	37.000	135.000.011	28128		39.155.871	76,02	29,00	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dibina (Perpustakaan)	Perpustakaan	30	751.639.358	10	200.000.000	10	50.000.000			-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Peringkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan		
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimtek (Orang)	Perpustakaan	450	89.274.888	150	200.000.000	150	223.000.000			149.668.000		67,12	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta bimtek (Orang)	Orang	0		100	182.907.900	100	112.379.300			2.322.400			
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengadaan Bahan Pustaka (Judul)	Eksemplar	10.500		1.000	210.608.800	1.000	243.815.400	250		242.688.000	25,00	99,54	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang di data (Kab/Kota)	Kab/Kota	30		0		0							
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Kegiatan)	Kegiatan	26		8	167.011.700	0	165.129.500			52.307.800		31,68	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Jumlah Lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan khusus (Lokus)	Lokus	10											
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Sarana Perpustakaan	Sarana	0											
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	24		12	167.011.700	24	165.129.500			52.307.800		31,68	
<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>		<b>Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>237.167.713</b>	<b>100</b>	<b>79.391.200</b>	<b>100</b>	<b>53.118.200</b>	<b>56,97</b>		<b>35.259.500</b>	<b>56,97</b>	<b>66,38</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam (Judul)	Judul	1550	64.936.077	500	11.507.600	500	10.163.600	323		7.503.500	64,60	73,83	
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Pengelolaan Koleksi Deposit yang tersedia (Judul)	Judul	1550	64.936.077	500	11.507.600	500	10.163.600	323		7.503.500	64,60	73,83	
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah		Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi (Eksemplar)	Eksemplar	2250		700	32.242.700	700	22.763.700	401		16.659.500	57,29	73,18	
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah yang dilayankan (Judul)	Judul	1650	85.225.042	500	17.792.700	500	13.048.700	241		11.944.500	48,20	91,54	
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang tersedia di deposit (Judul)	Judul	690	48.192.201	200	14.450.000	200	9.715.000	160		4.715.000	80,00	48,53	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah (Naskah)	Naskah	30	37.032.840	10	35.640.900	10	20.190.900	12		11.096.500	120,00	54,96	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan (Naskah)	Naskah	30	87.006.593	10	21.861.000	10	8.061.000	6		8.061.000	60,00	100,00	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang didayagunakan dan dilayankan secara daring/Online (Naskah)	Naskah	30	38.929.620	10	13.779.900	10	12.129.900	6		3.035.500	60,00	25,02	
<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>		<b>Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)</b>	orang	<b>43.000</b>	<b>-</b>	<b>43.000</b>	<b>731.641.700</b>	<b>43.000</b>	<b>1.850.266.700</b>	<b>13</b>		<b>716.511.841</b>		<b>38,72</b>	<b>Badan Penghubung Daerah</b>
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		Jumlah event Promosi yang dilaksanakan	Kali	8		8	731.641.700	8	1.850.266.700	13		716.511.841		38,72	
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	8		8	210.000.000	8	520.000.000			210.000.000		40,38	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	1		1	521.641.700	1	1.330.266.700	1		506.511.841		38,08	
													56,08	50,76	
<b>Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah</b>															
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing</b>		<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>Point</b>												
<b>Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat</b>		<b>Angka Harapan Hidup</b>	<b>Tahun</b>	<b>67,07</b>		<b>67,48</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi</b>	<b>Persen</b>	<b>85</b>	<b>490.192.636.948</b>	<b>85</b>	<b>127.652.856.921</b>	<b>85</b>	<b>104.413.855.986</b>			<b>82.231.021.452</b>		<b>78,75</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
		<b>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>							

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu				Realisasi Kinerja
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Persen	97		97		97					
		Persentase balita Wasting	Persen	11,41		11,41		11,41					
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	Persen	11,41		11,41		11,41					
		Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80 %	Persen	90		90		90					
		Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Persen	30		30		30					
		Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	100	3.651.104.864	100		100					
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Persen	100	-	100		100					
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Persen	100	-	100		100					
		Persentase Puskesmas Yang di Bina Mampu melaksanakan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA PKPR PKRET Lansia) sesuai Standar	Persen	87	-	87		87					
		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	75	-	75		75					
		Persentase Peserta JKN Dapat Mengakses Pelayanan Kesehatan	Persen	100	4.187.371.186	100		100					
		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	75	3.600.000.000	75		75					
		Persentase Penyelesaian Data dan Informasi Kesehatan Daerah	Persen	100	95.840.033	100		100					
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Jenis Obat Yang Diadakan dan Distribusikan	Jenis	20	491.531.153	20	13.260.183.753	20	9.531.181.390		8.613.453.709		90,37
		Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang disediakan	Paket	4	75.626.672.761	4	9.358.795.880	4					
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	258.312.957	1	464.514.000	1	463.294.000		319.336.250		68,93
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Jenis	3	218.638.724	3	12.795.669.753	3	9.067.887.390		8.294.117.459		91,47
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	741.853.974	1	4.787.668.432	1					
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	1	982.254.586	1	342.000.000	1					
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	30	1.187.775.766	30	324.675.000	30					
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket	300	10.098.612.892	300	1.849.389.848	300					
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	50	612.401.193	50	2.055.062.600	50					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP Rujukan UKM dan UKMR ujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	10	3.956.744.171	10	113.439.203.524	10	94.293.703.952		73.226.660.563		77,66
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	27707	912.043.506	27707	6.584.218.000	27707	6.584.218.000		2.718.960.380		41,30
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4200	46.687.447	4200	1.880.350.000	4200	1.955.349.964		801.209.737		40,98



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	50	242.040.536	50	1.091.000.200	50	615.000.000		304.630.000		49,53	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	50	144.117.959	50	111.000.000	50	111.000.000		-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	40	3.501.558.504	40	189.000.000	40	189.000.000		175.929.200		93,08	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	10	46.614.847.827	10	1.234.505.900	10	456.052.900		117.019.000		25,66	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	4	248.408.703	4	235.966.000	4	320.400.000		-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	10	107.068.430	10	8.273.275.700	10	8.243.275.700		2.922.925.238		35,46	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	383	373.293.715	383	413.833.000	383	100.000.000		-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	64.059.520	10	518.306.600	10	522.956.600		178.425.000		34,12	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	10	347.319.534	10	50.316.100	10	50.316.100		16.895.000		33,58	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	171	4.000.000.000	171	260.852.900	171	291.852.900		65.760.000		22,53	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang	0	98.425.389	0	155.319.500	0	155.319.500		19.600.000		12,62	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	11	93.716.689	11	3.300.000.000	11	4.050.000.000		3.425.070.000		84,57	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	10	9.011.763	10	87.306.912.226	10	68.960.462.236		61.898.357.622		89,76	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	10	123.776.022	10	449.650.000	10	317.500.000		50.680.000		15,96	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	10	409.886.957	10	101.612.000	10	100.000.000		35.620.000		35,62	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	20	370.687.096	10	652.597.846	10	640.512.500		370.647.786		57,87	
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Kabupaten/Kota	10	39.199.861	10	64.059.500	10	64.059.500		58.439.000		91,23	
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	10	256.153.891	10	80.000.000	10	80.000.000		-		-	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	10	111.439.939	10	72.000.000	10	72.000.000		60.320.000		83,78	
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	10	144.713.952	10	54.716.500	10	54.716.500		-		-	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	20		20	9.712.152	20	9.712.152		4.150.000		42,73	
	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	10		10	349.999.400	10	349.999.400		2.022.600		0,58	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah	Dokumen	1		1	408.571.089	1	387.571.089		199.405.640		51,45	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1		1	370.071.089	1	370.071.089		181.905.640		49,15	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit	3		3	38.500.000	3	17.500.000		17.500.000		100,00	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	Unit	45		45	544.898.555	45	201.399.555		191.501.540		95,09	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	45		45	109.126.655	45	109.126.655		100.511.540	92,11		
		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	0		0		0						
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	0		0	92.272.900	0	92.272.900		90.990.000	98,61		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	10		10	343.499.000	10						
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>Persen</b>	<b>2,5</b>	<b>3.651.104.864</b>	<b>2,5</b>	<b>583.672.984</b>	<b>2,5</b>	<b>2.109.995.376</b>		<b>568.924.749</b>		<b>26,96</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	500	199.772.218	500	89.943.700	500	89.943.700		32.410.215		36,03	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	112	49.337.098	112	29.983.700	112	29.983.700		13.950.215		46,53	
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	112	150.435.120	112	59.960.000	112	59.960.000		18.460.000		30,79	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen rencana pemenuhan Minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB	Orang	500	1.191.609.218	500	601.502.284	500	2.020.051.676		536.514.534		26,56	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	10	1.072.747.376	10	454.249.284	10	1.928.071.676		501.594.534		26,02	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Dokumen	1	118.861.842	1	107.773.000	1						
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Persen	2,5		2,5	39.480.000	2,5	91.980.000		34.920.000			
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		<b>Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>	<b>239.953.724</b>	<b>95</b>	<b>100.229.387</b>	<b>95</b>	<b>100.229.387</b>		<b>1.887.000</b>		<b>1,88</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Persen	95	90.816.566	95		95						
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	Sarana	18	90.816.566	18	96.200.887	18	96.200.887		1.887.000		1,96	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	18	16.955.958	18	96.200.887	18	96.200.887		1.887.000		1,96	
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi	Sarana	3	16.955.958	3	4.028.500	3	4.028.500		-		-	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	3		3	4.028.500	3	4.028.500		-		-	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Persentase SPM yang mencapai target</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>163.139.610.602</b>	<b>85</b>	<b>13.705.549.701</b>	<b>85</b>	<b>14.967.092.416</b>		<b>14.680.887.889</b>			<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>
		<b>Persentase SPM yang mencapai target</b>	<b>%</b>	<b>85</b>		<b>85</b>		<b>85</b>						
		<b>Persentase SPM yang mencapai target</b>	<b>%</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>90</b>						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase kelengkapan Sarana, Prasarana dan alkes (Data ASPAK)	%	90		90	13.498.885.501	90	14.809.565.382	6	14.680.887.889	6,67	99,13	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase kelengkapan alat kesehatan (Data ASPAK)	%	90		90	13.498.885.501	90	14.809.565.382	92	14.680.887.889	102,22	99,13	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100		100	206.664.200	100	157.527.034	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ODHA yang mendapatkan pemeriksaan CD4/viral load dan meso ARV	%	90		90	206.664.200	90	157.527.034					
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	29.809.896.151	80	5.200.000.000	80	5.200.000.000	80	4.121.319.960	100,00	79,3	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
		persentase SPM yang mencapai target	persen	76,19	-	76,19		76,19						
		Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	10.267.241.647	76,19		76,19						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		persentase ketersediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan	persen	93		93	4.464.000.000	93	4.513.999.961	73,42	3.661.393.831	78,95		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah unit alat kesehatan	Unit	1		1	1.402.500.000	1	1.655.802.361	2	1.651.900.000	200,00		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								200.000.000					
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis	jenis	13	1.616.215.772	13	3.061.500.000	13	2.658.197.600	13	2.009.493.831	100,00	75,60	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		persentase masyarakat yang terlayani	persen	100		100	686.000.000	100	686.000.000	72,75	459.926.129	72,75		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang terlayani	Orang	4363		4363	25.000.000	4363	15.000.000	0	1.200.000	-		
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah orang yang terlayani	tahun	1	5.610.281.704	1	25.000.000	1	35.000.000	0	32.260.000	-	92,17	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani	orang	36020	1.259.522.597	36020	91.300.000	36020	91.300.000	27966	74.415.524	77,64	81,51	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani	Orang	350	161.031.598	350	27.100.000	350	27.100.000	0	3.000.000	-	11,07	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang terlayani	orang	80	292.606.158	80	507.600.000	80	507.600.000	8	349.050.605	10,00	68,76	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah orang yang terlayani	orang	550	114.887.422	550	10.000.000	550	10.000.000	0	-	-	-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	persen	80	670.243.441	80	50.000.000	80	-		-			
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi	dokumen	2	20.753.975	2	50.000.000	2	-		-			
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Persentase SPM yang mencapai target</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>144.479.341.067</b>	<b>100,00</b>	<b>29.787.645.055</b>	<b>100,00</b>	<b>28.701.102.340</b>		<b>22.654.546.931</b>			Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang diadakan	Paket	4		4	29.147.565.055	4	28.319.779.340		22.371.954.985			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	200	84.197.172.000	200	25.038.265.055	200	23.776.722.340		18.777.548.585	78,00	78,97	
	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	5.013.649.000	1	4.109.300.000	1	4.543.057.000		3.594.406.400	100,00	79,12	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	100	700.000.000	100	640.080.000	100	381.323.000		282.591.946	40,00	74,11	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	-		-	640.080.000	-	381.323.000		282.591.946			
		Jumlah Masyarakat Miskin, Terlantar dan Masalah Sosial Lainnya yang Tertangani	Dokumen	132	209.410.000	132		132				0,00		
												56,84	49,51	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan						
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Balita Stunting	%							0,00		0,00			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase balita Wasting	%											Dinas Kesehatan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas	Persen	70	5.059.563.209	70	263.576.970	70	263.576.970			126.282.400		47,91	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Saluran Media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi Kesehatan	Jenis	7		7	103.576.970	7	103.576.970			20.322.400		19,62	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	7		7	103.576.970	7	103.576.970			20.322.400		19,62	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Puskesmas yang Dibina Germas dan PHBS	Puskemas	40		40	160.000.000	40	160.000.000			105.960.000			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	40		40	160.000.000	40	160.000.000			105.960.000			
														29,05	
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing		Indeks Pendidikan	Point												
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan		Harapan Lama Sekolah	Tahun				23.757.559.575					0,00			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun									0,00			
		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6	1.486.214.496.782	70,6	549.441.870.700	70,6	584.689.202.538			60.330.457.717		10,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02		98,02		98,02							
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100		100		100							
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28		95,28		95,28							
		Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB	Rasio	0,048611111		0,048611111		0,048611111							
		Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	0,042361111		0,042361111		0,042361111							
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Rasio	0,047222222		0,047222222		0,047222222							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Persentase Angka Drop Out (DO) SMA	%	0,24		0,24	274.398.190.634	0,24	304.360.348.731			36.255.872.142		11,91	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	40		40	84.284.675.000	40	16.723.975.300			5.060.877.080		30,26	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								4.073.883.000			381.492.200			
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi								3.031.178.000			1.838.908.000			
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika								4.986.065.750			2.565.695.300			
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia								7.746.556.864			3.554.464.900			
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer								2.026.199.000			455.337.700			
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa											-			
	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA											-			
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								5.296.405.000			380.220.900			
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								570.804.000			327.928.000			
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula											-			
	Pembangunan Asrama Sekolah								996.873.000			113.447.000			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	35		35	200.000.000	35	12.822.059.500			1.753.315.500		13,67	
	Pembangunan Fasilitas Parkir											-			
	Pembangunan Kantin Sekolah											-			
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah								422.919.000			86.041.000			
	Pembangunan Ruang/Sudut Baca											-			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	40		40	573.517.500	40	29.702.845.500			6.557.905.500		22,08	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									2.910.164.000		602.153.000		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi									2.312.468.944		562.269.700		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika									1.634.972.000		280.445.000		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia									1.172.706.942		213.977.000		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer									614.910.000		98.991.000		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa									686.951.000		129.399.000		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA											-		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah									894.351.000		214.022.000		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									1.645.206.000		400.934.000		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula											-		
	Rehabilitasi Asrama Sekolah									832.807.000		832.807.000		
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									4.114.655.000		2.168.715.800		
	Rehabilitasi Fasilitas Parkir											-		
	Rehabilitasi Kantin Sekolah											-		
	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah											-		
	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca											-		
	Pengadaan Mebel Sekolah									4.857.450.000		-		
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah											-		
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											-		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	13507	13507	3.491.063.100	13507	1.641.493.100	819.388.700				49,92	
	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah											-		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	5	5	3.685.000.000	5	7.631.543.000	4.137.997.800				54,22	
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah											-		
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											-		
	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah											-		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas											-		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	1	411.600.000	1	502.668.300	502.034.100				99,87	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik											-		
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas											-		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											-		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	1200	1200	76.366.000	1200	76.371.000	73.219.183				95,87	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		1177	1177	351.150.300	1177	202.268.600	123.424.700				61,02	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas											-		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	344	344	176.996.603.334	344	180.593.793.131	-				-	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas											-		
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100	135	570.613.300	135	500.838.500	372.707.500				74,42	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											-		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	1.105.200.000	1	1.256.367.900	711.815.383				56,66	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	10	10	2.024.770.100	10	1.400.998.400	805.982.100				57,53	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100		100	627.632.000	100	477.601.000		129.956.096		27,21	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Persentase Angka Drop Out (DO) SMK	%	0,57		0,57	238.066.899.833	0,57	244.316.659.225		17.992.085.565		7,36	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	65		65	94.611.911.000	65	12.685.746.920		4.502.412.120		35,49	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										-			
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	16		16	200.000.000	16	36.614.133.650		3.972.966.250		10,85	
	Pembangunan Ruang Laboratorium								3.394.718.000		15.900.000			
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										-			
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								927.237.000		15.900.000			
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula										-			
	Pembangunan Asrama Sekolah										-			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	25		25	595.000.000	25	3.961.722.000		407.056.000		10,27	
	Pembangunan Fasilitas Parkir										-			
	Pembangunan Kantin Sekolah										-			
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah										-			
	Pembangunan Ruang/Sudut Baca										-			
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	17		17	593.482.400	17	3.337.369.700		462.920.700		13,87	
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										-			
	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa										-			
	Rehabilitasi Ruang Laboratorium										-			
	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah										-			
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah										-			
	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula										-			
	Rehabilitasi Asrama Sekolah										-			
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										-			
	Rehabilitasi Fasilitas Parkir										-			
	Rehabilitasi Kantin Sekolah										-			
	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah										-			
	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca										-			
	Pengadaan Mebel Sekolah								7.850.000.000		-			
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah										-			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah										-			
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2		2	1.000.000.000	2	1.600.000.000		791.344.800		49,46	
	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah										-			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	8		8	2.185.000.000	8	37.384.697.000		5.535.166.657		14,81	
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah										-			
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										-			
	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah										-			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan										-			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								541.092.346		537.660.800			
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik										-			
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	2		2	399.499.900	2	399.499.900		280.591.804		70,24	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										-			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	1200		1200	76.437.000	1200	116.437.000		33.766.934		29,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100		100	78.275.000	100	38.275.000		12.475.000		32,59	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan		
	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi														
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	9		9	1.087.253.400	9	1.105.253.400			424.339.000		38,39	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	337		337	133.970.293.333	337	132.702.880.409			-		-	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								175.599.100			149.354.544		85,05	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1		1	325.000.000	1	350.000.000			273.562.156		78,16	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	10		10	1.778.775.300	10	601.498.400			434.116.100		72,17	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100		100	630.472.500	100	530.499.400			142.552.700		26,87	
Pengelolaan Pendidikan Khusus		Persentase Akreditasi SLB minimal B	%	40		40	36.976.780.233	40	36.012.194.582			6.082.500.010		16,89	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								8.791.819.950			2.193.289.250			
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	1		1	13.295.463.000	1	827.627.400			816.574.800			
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								258.889.600			-			
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								331.501.400			-			
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								189.869.100			21.755.000			
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula											-			
	Pembangunan Asrama Sekolah											-			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											-			
	Pembangunan Fasilitas Parkir											-			
	Pembangunan Kantin Sekolah									1.249.807.900		409.977.100			
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah											-			
	Pembangunan Ruang Laboratorium									463.439.250		-			
	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas											-			
	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)											-			
	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)									511.965.400		43.092.600			
	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)											-			
	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)											-			
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2		2	68.500.000	2	26.000.000			25.570.000		98,35	
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											-			
	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah											-			
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah									167.612.250		-			
	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula											-			
	Rehabilitasi Asrama Sekolah											-			
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									316.595.600		69.327.400			
	Rehabilitasi Fasilitas Parkir											-			
	Rehabilitasi Kantin Sekolah											-			
	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah											-			
	Rehabilitasi Ruang Laboratorium											-			
	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus											-			
	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas											-			
	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)											-			
	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)											-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan						
	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)														
	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)														
	Pengadaan Mebel Sekolah								1.279.398.250						
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2		2	968.689.500	2	968.689.500		483.183.000		49,88		
	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah														
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2		2	114.000.000	2	522.199.100		54.924.560		10,52		
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah														
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
	Pemeliharaan Rutin Rumah Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah														
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	50		50	2.022.550.000	50	1.923.013.000		1.080.687.500		56,20		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2		2	100.000.000	2							
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik														
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus														
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	250		250	59.500.000	250	79.228.000		22.695.000		28,65		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100		100	70.529.000	100	105.177.000		84.477.000		80,32		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	30		30	18.375.643.333	30	16.337.528.582						
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	450		100	394.104.100	100	337.904.000		20.380.000		6,03		
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1		1	170.000.000	1	166.500.000		71.060.000				
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	9		9	976.501.300	9	850.506.300		685.506.800		80,60		
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100		100	361.300.000	100	306.923.000						
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>		<b>Persentase Pengembangan Kurikulum</b>	%		1.986.884.736		100								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Persentase sekolah yang melakukan penetapan kurikulum	%		-		-								
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta bimtek penyusunan silabus muatan lokal SMK	Orang		-		-								
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta workshop kurikulum SMK	Orang		-		-								
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus															
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus														
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		<b>Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)</b>	nilai	6,5	208.215.004.195	6,5	51.046.014.300	6,5	51.146.014.300		32.185.761.570		62,9		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		<b>Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV</b>	%	100		100		100							



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
		Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100		100		100						
		Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	nilai	6,5		6,5		6,5						
		Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100		100		100						
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Dokumen	10		10	51.046.014.300	10	51.146.014.300		32.185.761.570		62,93	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	10		10	50.979.633.500	10	50.973.633.500		32.183.021.570		63,14	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	9		9	66.380.800	9	172.380.800		2.740.000			
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>		<b>Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan</b>	%		<b>194.889.101</b>									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>		<b>Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan</b>	%		<b>831.855.187</b>									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi														
	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi													
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>		<b>Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.350.050.780</b>	<b>100</b>	<b>3.521.474.700</b>		<b>1.240.263.420</b>		<b>35,22</b>	Dinas Pemuda dan Olahraga
		<b>Persentase Pembinaan Pemuda Berprestasi</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>						
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda			160		3.350.050.780		3.521.474.700		1.240.263.420		35,22	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi untuk tingkat nasional	Orang	1	15	1	125.000.000	1	117.500.000		114.285.160		97,26	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah wirausaha muda yang mengikuti pelatihan	Orang	100	100	100	25.000.000	100	25.000.000		25.000.000		100,0	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	0	18	0	885.050.780	0	1.161.474.800		355.033.800		30,57	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terpelihara	Unit	1	-	1		1						
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Lembaga atau Organisasi Kepemudaan yang Difasilitasi	Lembaga	20	100	20	2.215.000.000	20	2.110.000.000		700.000.000		33,2	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Orang	25	60	25	100.000.000	25	107.499.900		45.944.460		42,74	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>		<b>Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi</b>	%	100	100	100	18.409.971.980	100	22.154.020.400		13.405.864.052		60,5	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Presentase Sarana Prasarana Olahraga yang Terstandar	%	45	40	45	6.094.956.780	45	6.448.160.000		2.774.521.992		43,0	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Terpelihara	Unit	1	2	1	6.094.956.780	1	6.448.160.000		2.774.521.992		43,0	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Medali Yang Diperoleh	Medali	40	40	40	2.322.015.300	40	2.377.124.500		1.484.564.060		62	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	event	4	5	4	1.035.000.000	4	1.354.924.500		507.505.560		37,46	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	200	150	200	1.287.015.300	200	1.022.200.000		977.058.500		95,58	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah cabor yang dibina	cabor	3	3	3	112.999.900	3	543.735.900		21.778.000		4,01	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan	Jumlah Atlit Pelajar yang di Bina	Orang	12	12	12	112.999.900	12	543.735.900		21.778.000		4,01	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	Lembaga	10	10	10	9.880.000.000	10	12.785.000.000		9.125.000.000		71,4	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	0	10	0	9.880.000.000	0	12.785.000.000		9.125.000.000		71,4	
		Jumlah Lembaga atau Organisasi Keolahragaan yang Difasilitasi	Lembaga	10		10		10						
													44,64	
<b>Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan</b>														
<b>Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan</b>														
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point											
<b>Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</b>		Indeks Kualitas Air	Point				1.482.230.711			0,00		0,00		
		Indeks Kualitas Udara	Point							0,00		0,00		
		Indeks Kualitas Air Laut	Point							0,00		0,00		
<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>		persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24	1.024.902.302,60	24	149.957.400	24	498.357.400		145.678.483		29,23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	dokumen	2	602.571.166,34	2	69.117.400	2	69.117.400		51.202.877		74,08	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	445.639.676,49	1	39.248.200	1	39.248.200		31.741.200		80,87	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	1	156.931.489,85	1	29.869.200	1	29.869.200		19.461.677		65,16	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	dokumen	7	422.331.136,26	7	80.840.000	7	429.240.000		94.475.606		22,01	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen	6	218.812.769,16	6	77.540.000	6	77.540.000		45.480.000		58,65	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	8	133.665.362,66	8	1.600.000	8	300.000.000		1.600.000		0,53	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	1	69.853.004,43	1	1.700.000	1	51.700.000		47.395.606		91,67	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	2.835.284.286	10	126.500.200	10	675.332.750		526.707.093		77,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan				
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha	30	2.181.040.532,41	30	97.730.700	30	646.563.250		505.199.093		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	1.257.588.598,00	1	49.228.700	1	149.228.700		120.428.900		80,70
		Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	Lokasi	10		10	100.000.000	10					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1	2.181.040.532,41	1	48.502.000	1	48.502.000		31.371.500		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	titik sampel	282		282	474.169.950	282	448.832.550		353.398.693		
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	3	437.488.380,00	3	28.769.500	3	28.769.500		21.508.000		
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	200.000.000,00	1	28.769.500	1	28.769.500		21.508.000		74,76
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		<b>pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa</b>	lokasi	1,00	<b>232.926.464</b>	1,00	48.690.300	1,00	<b>48.690.300</b>		<b>19.496.200</b>		40,04 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi	1,00	128.583.400,00	1,00	48.690.300	1,00	48.690.300		19.496.200		40,04
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1,00	128.583.400,00	1,00	48.690.300	1,00	48.690.300		19.496.200		40,04
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>		<b>Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya</b>	unit	<b>210</b>	<b>232.426.464</b>	<b>210</b>	<b>34.430.400</b>	<b>210</b>	<b>34.430.400</b>		<b>20.068.260</b>		58,3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	232.426.464,11	30	34.430.400	30	34.430.400		20.068.260		58,29
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	persetujuan/izin	5	232.426.464,11	5	34.430.400	5	34.430.400		20.068.260		58,29
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		<b>Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan</b>	usaha/kegiatan	<b>30</b>	<b>605.251.864</b>	<b>30</b>	<b>75.000.000</b>	<b>30</b>	<b>75.000.000</b>		<b>40.388.433</b>		53,85 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	usaha/kegiatan	60	605.251.863,75	60	75.000.000	60	75.000.000		40.388.433		53,85
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	1	304.909.970,89	1	37.500.000	1	37.500.000		12.848.033		34,26
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1	300.341.892,86	1	37.500.000	1	37.500.000		27.540.400		73,44
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		<b>Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan</b>	%	<b>10</b>	<b>632.449.873</b>	<b>10</b>	<b>149.924.600</b>	<b>10</b>	<b>149.924.600</b>		<b>15.030.000</b>		10,03 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	10	632.449.873,25	10	149.924.600	10	149.924.600		15.030.000		10,03	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	632.449.873,25	1	149.924.600	1	149.924.600		15.030.000		10,03	
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		<b>Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat</b>	<b>kelompok</b>											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>pengaduan</b>	<b>20</b>	<b>641.333.479</b>	<b>20</b>	<b>74.999.900</b>	<b>20</b>	<b>74.999.900</b>		<b>16.230.900</b>		<b>21,64</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	pengaduan	20	641.333.478,89	20	74.999.900	20	74.999.900		16.230.900		21,64	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	15	319.536.688,77	15	37.499.900	15	37.499.900		10.613.300		-	28,30
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	5	321.796.790,12	5	37.500.000	5	37.500.000		5.617.600			14,98
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</b>		<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>	<b>Point</b>				<b>8.351.117.082</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>45,81</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>		<b>Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>61.710.986.449</b>	<b>10</b>	<b>4.983.222.100</b>	<b>10</b>	<b>5.968.683.500</b>		<b>2.266.268.098</b>		<b>37,97</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		<b>Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>		<b>100</b>						
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	km	10,00	1.238.270.457,41	10,00	688.308.500,00	10,00	121.643.500		103.671.600		85,23	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	9,00	1.238.270.457,41	9,00	688.308.500,00	9,00						
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecualli pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHP/RPHJPD yang tersusun	%	100	925.545.561,16	100	74999800	100	320.054.500		130.506.506		40,78	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	28	925.545.561,16	5	74.999.800	5	320.054.500		130.506.506		40,78	
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen	1	4.616.641.548,59	1	805.766.500	1	521.470.500		121.030.070		23,21	
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	548.256.117,70	1	99.590.400	1	99.590.400		62.888.342		63,15	
	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen	5	219.652.367,17	5	99836900	5	54.836.900		9.127.000		16,64	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	1	105.800.954,21	1	59959000	1	59.959.000		33.726.728		56,25	
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	dokumen	3	159.370.240,10	2.919	536.915.300	2.919	297.619.300		12.093.500		4,06	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	dokumen	2	138.485.027,18	1	9.464.900	1	9.464.900		3.194.500		33,75	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	2.919	2.967.996.322,23	4.541	1.518.031.300	4.541	2.308.568.800		595.641.109		25,80	
		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	55	17.207.045.793,56	1		1						
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	4.624.324.801,33	39	50.000.000	39	50.000.000		18.665.840		37,33	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	387905	6.947.952.881,86	10	593.031.400	10	1.027.568.900		288.510.469		28,08	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	1.375.552.817,64	1	49.999.900	1	170.999.900		15.496.300		9,06	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	817	1.823.717.677,03	1	825.000.000	1	1.060.000.000		272.968.500		25,75	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	39	2.435.497.615,71	12	1.776.174.600	12	2.165.129.800		1.193.042.254		55,10	
		Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	%	57	6.991.212.643,40	5		5						
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi	10	5.933.545.861,44	11	1.576.141.900	11	1.727.997.020		939.014.350		54,34	
		Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan		312.000	88.746.168,00	0		0	173.250.080		130.106.304		75,10	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1,00	968.920.613,96	1,00	155.989.500,00	1,00	219.839.500		100.908.000		45,90	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1,00			44.043.200,00		44.043.200		23.013.600		52,25	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit	12,00			46.023.000,00		412.898.000		66.318.500			
		Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					50.000.000,00		181.875.000		47.450.000		26,09	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	unit managemen	5,00			46.023.000,00		46.023.000		18.868.500		41,00	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	11,00			73.918.400,00		185.000.000		-		-	
		Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dokumen	-			73.918.400,00		118.918.400		56.058.059		47,14	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00					118.918.400		56.058.059			
	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi</b>	<b>ha</b>		<b>2.843.299.456</b>	<b>30.503</b>	<b>388.295.100</b>	<b>30.503</b>	<b>396.895.100</b>		<b>43.172.800</b>		<b>10,88</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1			238.312.700		246.912.700		18.830.000		7,63	
		Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi	3			24.203.000		32.803.000		13.441.000		40,97	
		Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Permohonan	1			204.109.700		204.109.700		-		-	
		Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Dokumen	1			10.000.000		10.000.000		5.389.000		53,89	
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	24	1.927.987.905,79	24	44.694.200	24	44.694.200		8.210.100		18,37	
		Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	585.814.156,74	1	44.694.200	1	44.694.200		8.210.100		18,37	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang dikelola	kelompok	8	321.310.967,94	8	105.288.200	8	105.288.200		16.132.700		15,32	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	16	128.524.387,17	16	38.633.200	16	38.633.200		11.289.200		29,22	
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha	100	715.617.361,57	100	66.655.000	100	66.655.000		4.843.500			
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>		<b>Persentase KTH yang meningkat kelasnya</b>	%	17,70	<b>2.125.242.316</b>	17,70	150.000.900	17,70	<b>493.000.900</b>		<b>286.219.373</b>		<b>58,06</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	10	2.921.881.515,56	10	150.000.900	10	493.000.900		286.219.373		58,06	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	67	137.521.094,28	67	50.001.000	67	50.001.000		19.031.000		38,06	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	65	197.927.556,25	65	50.000.000	65	393.000.000		228.987.373		58,27	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	1.000	2.464.695.865,03	1.000	49.999.900	1.000	49.999.900		38.201.000		76,40	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>		<b>peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas</b>	DAS	4	<b>14.296.328.273</b>	4	149.999.900	4	<b>149.999.900</b>		<b>53.162.800</b>		<b>35,44</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS	32	82.983.248.577	32	149.999.900	32	149.999.900		53.162.800		35,44	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	328.328.399,48	1	50.000.000	1	50.000.000		40.242.800		80,49	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	1	27.077.312.239,95	1	50.000.000	1	50.000.000		12.920.000		25,84	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	Unit	10		10	49.999.900	10	49.999.900		-			
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>Peresentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</b>	%	<b>90,31</b>	<b>3.017.590.900</b>	<b>90,31</b>	<b>700.000.000</b>	<b>90,31</b>	<b>500.278.700</b>		<b>189.112.856</b>		<b>37,80</b>	Dinas PUPR
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Orang	400		400	170.407.300	400						
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						170.407.300							
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dokumen	1		1	69.518.600	1	74.518.600		33.778.217	-	45,33	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota		%	90,31		90,31	69.518.600	90,31	74.518.600		33.778.217		45,33	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	1		1	409.009.800	1	375.195.800		146.354.639		39,01	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		%	90,31		90,31	409.009.800	90,31	375.195.800		146.354.639		39,01	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Tersedianya Bahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1		1	51.064.300	1	50.564.300		8.980.000		17,76	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		%	90,31		90,31	51.064.300	90,31	50.564.300		8.980.000		17,76	
													37,29	
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan</b>		<b>Neraca pengelolaan sampah (%)</b>	%											
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Sampahan</b>		<b>Persentase Penanganan Sampah</b>	%				<b>70</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
		Persentase Pengurangan Sampah	%							0,00				
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	%	100	15.916.448.484	100	5.615.973.800	100	9.881.014.700		3.264.025.912			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase penanganan sampah	%	70	3.148.514.551,19	70	5.615.973.800	70	9.881.014.700		3.264.025.912			
	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional								4.937.514.700		2.093.064.956			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen	1		1	5.615.973.800	1	4.943.500.000		1.170.960.956			
<b>Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi</b>														
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas</b>														
		Indeks Daya Beli (Point)	%											
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan		Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar				17.814			7835		11,49		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan investor	Persen	10	724.463.980	10	279.600.000	10	244.847.900		141.748.600		57,89	DPMPPTSP
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah dokumen	Dokumen	2	311.507.601	2	279.600.000	2	244.847.900		141.748.600		57,89	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Kegiatan usaha	1	146.948.355	1	279.600.000	1	244.847.900		141.748.600		57,89	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah dokumen promosi	%		1.050.026.808				150.000.000		149.800.000		99,87	DPMPPTSP
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah dokumen	Dokumen		1.050.026.808				150.000.000		149.800.000		99,87	
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan	Dokumen		507.278.116				1		1			
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan event	Dokumen		542.748.692				1	150.000.000	0	149.800.000		99,87
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	Persen	93	780.295.837	93		93	5.826.200		-		-	DPMPPTSP
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undanguan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah dokumen layanan perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen	3	120.058.076	3	49.400.000	3	5.826.200		-			
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaku usaha	3.600	120.058.076	3.600	49.400.000	3.600	5.826.200		-			
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang taat LKPM	Persen	60	1.079.612.988	60	898.700.000	60	748.700.000		442.603.000		59,12	DPMPPTSP
		Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	60	1.079.612.988	60		60						
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Perusahaan	500	171.888.232	500	898.700.000	500	748.700.000	0	442.603.000		59,12	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	8	541.270.764	8	501.956.800	8	595.899.800		349.410.000		58,64	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan usaha	8	366.453.992	8	396.743.200	8	152.800.200		93.193.000		60,99	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	%		171.027.294				100					DPMPPTSP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan						
Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPSTP	Dokumen		171.027.294		2								
	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPSTP secara OSS	Dokumen		171.027.294		2								
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas</b>		<b>Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan &amp; kehutanan</b>	<b>%</b>				<b>24</b>			<b>27,20</b>		<b>113,90</b>	<b>64,65</b>		
<b>PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		<b>Pertumbuhan Populasi Ternak</b>	<b>0,1</b>		<b>46.161.000.000</b>	<b>9</b>	<b>41329946151</b>	<b>9</b>	<b>39.627.679.451</b>		<b>11.062.732.950</b>			<b>27,92</b>	<b>Disnakan</b>
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah bibit ternak unggul yang dihasilkan	ekor	<b>100</b>		<b>100</b>	310546000	<b>100</b>	310.546.000			161.244.000			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	<b>1</b>		<b>1</b>	310546000	<b>1</b>	310.546.000			161.244.000			
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Luas lahan HPT yang dikelola	Ha	<b>30</b>	1.735.256.154	<b>30</b>	70436000	<b>30</b>	195.436.800			128.500.000	-	65,75	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	<b>1</b>	1.735.256.154	<b>1</b>	70436000	<b>1</b>	195.436.800			128.500.000	-	65,75	
		Laporan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan mutu pakan yang dihasilkan	laporan	<b>1</b>	1.277.279.138	<b>1</b>		<b>1</b>					-		
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Semen Beku dihasilkan	Straw	<b>145000</b>	805.060.426	<b>145000</b>	416792951	<b>145000</b>	1.468.692.951			447.944.750		30,50	
		Jumlah HPT yang dihasilkan	Ton	<b>70</b>	472.218.712	<b>70</b>		<b>70</b>							
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	<b>2</b>		<b>2</b>	351875000	<b>2</b>	1.403.775.000			443.492.750		31,59	
		Pakan ternak yang dihasilkan	ton	<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>							
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Ton	<b>5</b>		<b>5</b>	49995000	<b>5</b>	49.995.000			3.640.000		7,28	
		Sampel Straw yang diperiksa	sample	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>200</b>							
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	<b>1</b>		<b>1</b>	14922951	<b>1</b>	14.922.951			812.000		5,44	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah bibit ternak yang diadakan (Ekor)	ekor	<b>1000</b>		<b>1000</b>	40532171200	<b>1000</b>	37.653.003.700			10.325.044.200		27,42	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	Ekor	<b>1000</b>		<b>1000</b>	40399671100	<b>1000</b>	37.530.573.600			10.243.827.000		27,29	
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>							
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah alat pengolah pakan yang diadakan	unit	<b>15</b>		<b>15</b>	132500100	<b>15</b>	122.430.100			81.217.200		66,34	
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>							
		Jumlah Kelompok Pakan	Kelompok	<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>							
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		<b>CAKUPAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK (PERSEN)</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>582.000.001</b>	<b>100</b>	<b>30.000.100</b>	<b>100</b>	<b>30.000.100</b>					<b>Disnakan</b>	
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	Lokasi	<b>2</b>	277.207.623	<b>2</b>	30.000.100	<b>2</b>	30.000.100						



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	206.477.480	1	15.000.100	1	15.000.100	1	-	100,00	-	
		Laporan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	Laporan	1	70.730.143	1		1	15.000.000	12	-	1.200,00		
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Frekuensi Pengawasan	kali	12	304.792.377	12	15.000.000	12	15.000.000		-			
		Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	0	149.092.137	0		0			-			
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		<b>Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS</b>	%	<1	<b>2.884.999.999</b>	<1	<b>590.100.235</b>	<1	<b>592.822.049</b>	<1	<b>340.432.914</b>	100,00	<b>57,43</b>	<b>Disnakanw</b>
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah PHMS yang dikendalikan (Penyakit)	Penyakit	5	688.098.844	5	210.000.235	5	209.998.535	10	73.526.950	200,00	35,01	
	Pengendalian Risiko dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin Anthrax, SE, Rabies dan AI yang diadakan	Dosis	30000	211.067.826	30000	105.000.160	30000	104.998.460	2706,7	9.032.975	9,02	8,60	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pemetaan yang dihasilkan	Dokumen	1	216.182.805	1	44.999.975	1	44.999.975	1	31.514.375	100,00	70,03	
	Penganggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	20	260.848.214	20	60.000.100	20	60.000.100	8	32.979.600	40,00	54,97	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Jumlah RPH/RPU/TPH diawasi (unit)		61	531.226.609	61	45.100.000	61	45.100.000	70	20.628.850	114,75	45,74	
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan Hasil penilaian resiko keamanan produk hewan	(laporan)	1	191.801.772	1	14.999.900	1	14.999.900	1	3.473.750	100,00	23,16	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Frekuensi Pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	(kali)	4	178.840.198	4	15.000.100	4	15.000.100	10	9.655.100	250,00	64,37	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Frekuensi pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas provinsi	(kali)	12	160.584.639	12	15.100.000	12	15.100.000	12	7.500.000	100,00	49,67	
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah RPH dan kelompok pengolah hasil peternakan yang tersertifikasi	(sertifikat)	5	724.045.979	5	310.000.000	5	312.723.514	10	237.298.514	200,00	75,88	
		Jumlah RPH/ Unit Usaha Produk Ternak Ber NKV (unit)	(unit)	5	218.156.134	5		5		5		100,00		
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah UMKM Ber NKV/ Bersertifikat (unit)	(unit)	15	505.889.844	15	235.000.000	15	237.723.514	5	219.403.514	33,33	92,29	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan laboratorium penyakit hewan yang tersedia (Pnyakit)	Penyakit	5		5	75.000.000	5	75.000.000		17.895.000	-	23,86	
Kesejahteraan Hewan		Jumlah pemotongan betina produktif yang diekndalikan di RPH (Persen)		1	437.273.131	1	25.000.000	1	25.000.000	2	8.978.600	200,00	35,91	
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah RPH Diawasi	(unit)	61	220.030.616	61	25.000.000	61	25.000.000	70	8.978.600	114,75	35,91	
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		<b>Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi</b>	%	<b>100</b>	<b>436.021.633</b>	<b>100</b>	<b>1.286.870.800</b>	<b>100</b>	<b>1.286.870.800</b>		<b>99.745.180</b>	-	<b>7,75</b>	<b>Disnakanw</b>
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	(paket)	10	260.536.230	10	44.996.000	10	44.996.000	0	27.329.320	-	60,74	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	(kegiatan)	10	260.536.230	10	44.996.000	10	44.996.000	1	27.329.320	10,00	60,74	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok berbasis korporasi		3	175.485.402	3	1.241.874.800	3	1.241.874.800	3	72.415.860	100,00	5,83	
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi tersosialisasi	(korporasi)	3	93.430.599	3	1.191.874.800	3	1.191.874.800	3	58.435.860	100,00	4,90	
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi yang dibina	(lembaga)	5	44.498.718	5	50.000.000	5	50.000.000	3	13.980.000	60,00		
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		<b>Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian</b>	%	<b>2,05</b>	<b>64.204.913.319</b>	<b>2,05</b>	<b>8.407.861.600</b>	<b>2,05</b>	<b>12.530.950.200</b>		<b>3.652.264.700</b>		<b>29,15</b>	<b>Distanbun</b>

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Peringkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	3	14.375.159.070	3	4.559.000.000	3	6.513.845.000		750.130.000		11,52	
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	3	14.375.159.070	3	4.559.000.000	3	6.513.845.000		750.130.000		11,52	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase Bantuan Benih/sarana pendukung budidaya Yang Termaanafaatkan	%	100	49.305.227.080	100	3.848.861.600	100	6.017.105.200		2.902.134.700		48,23	
		Persentase Perbanyak Benih Tanaman	%	100	35.677.829.400	100		100						
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih			35.677.829.400		87.820.700		62.000.000		45.505.000		73,40	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	4	7.006.789.800	4	3.441.040.900	4	705.000.000		67.677.700		9,60	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Kg	51.000	6.620.607.880	51.000	320.000.000	51.000	395.250.000		333.295.800		84,33	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran							4.854.855.200		2.455.656.200			
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		<b>Pengembangan industrialisasi pertanian</b>	<b>unit/paket</b>	<b>2</b>	<b>267.360.989.055</b>	<b>2</b>	<b>108.880.013.592</b>	<b>2</b>	<b>138.562.189.393</b>		<b>62.395.158.178</b>		<b>45,03</b>	<b>Distanbun</b>
		<b>Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian</b>	<b>%</b>	<b>96,79</b>	<b>-</b>	<b>96,79</b>		<b>96,79</b>						
Penataan Prasarana Pertanian		Persentase Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi (termasuk prasarana pendukung irigasi) dan Prasarana Pertanian Yang Dimanfaatkan	%	100	210.857.059.574	100	122.186.564.697	100	138.562.189.393		62.395.158.178		45,03	
		Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana UPTD yang dimanfaatkan	%	100	111.490.096.051	100		100						
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1	35.937.090.995	1	90.903.192.592	1	91.891.078.437		36.277.204.400		39,48	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	0	63.429.872.528	0	16.976.821.000	0	19.921.525.050		6.883.635.000		34,55	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1		1	1.000.000.000	1	3.539.981.053		3.426.106.053			
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	3		3	13.306.551.105	3	23.209.604.853		15.808.212.725			
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		<b>Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI</b>	<b>%</b>	<b>96,5</b>	<b>1.229.042.136</b>	<b>96,5</b>	<b>32.500.000</b>	<b>96,5</b>	<b>32.500.000</b>		<b>31.810.000</b>		<b>97,88</b>	<b>Distanbun</b>
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari Serangan OPT dan DPI	%	95	802.442.000	95	32.500.000	95	32.500.000		31.810.000		97,88	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	2967	802.442.000	2967	32.500.000	2967	32.500.000		31.810.000		97,88	
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		<b>Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>18.894.573.000</b>	<b>100</b>	<b>1.417.411.000</b>	<b>100</b>	<b>484.012.500</b>		<b>413.310.532</b>		<b>85,39</b>	<b>Distanbun</b>
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase BPP yang operasional	%	100	7.854.246.000	100	1.417.411.000	100	484.012.500		413.310.532		85,39	
		Persentase Siswa Lulus yang bekerja di bidang pertanian	%	5	7.854.246.000	5	140.000.000	5						
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	orang/bulan	144	7.854.246.000	144	1.276.423.500	144	484.012.500		413.310.532		85,39	
		Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	kegiatan	9	7.854.246.000	9		9						
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	0	2.546.319.100	0	425.000.000	0						
		Jumlah Petani yang mendapatkan penyuluhan dan kegiatan pemberdayaan petani	orang	60	1.785.504.100	60		60						
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>		<b>Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b></b>	<b>10</b>	<b>1.863.000.000</b>	<b>10</b>	<b>4.459.316.000</b>		<b>3.317.039.223</b>		<b>74,38</b>	<b>Dislutkan</b>

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas ruang laut dan pesisir yang dikelola		183.881		183.881,43	1.633.000.000	183.881,43	3.980.521.000		2.989.759.223		75,11	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen materi teknis muatan perairan pesisir pada RTRW Provinsi /Dokumen Final RZWP3K	Dokumen	1		1	1.000.000	1	1.244.000		1.244.000		100,00	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola		216.126		182.926	1.624.000.000	182.926	3.979.277.000		2.988.515.223		75,10	
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas wilayah perairan pesisir dan PPK yang direhabilitasi	Ha	6		6	3.500.000	6						
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	110		110	4.500.000	110						
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar gas dan minyak bumi yang mendapatkan izin	unit	15		15	5.000.000	15	3.995.000		2.620.000			
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi	15		15	4.000.000	15	3.995.000		2.620.000			
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	10		10	1.000.000	10						
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							225.000.000		474.800.000		324.660.000			
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	200		200	225.000.000	200	474.800.000		324.660.000			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>produksi perikanan tangkap</b>	<b>%</b>	<b>256.572</b>	<b>8.518.124.922</b>	<b>692.281</b>	<b>24.380.122.500</b>	<b>256.572</b>	<b>24.380.122.500</b>	<b>159869,73</b>	<b>12.413.166.403</b>	<b>62,31</b>	<b>50,92</b>	<b>Dislutkan</b>
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan	Ton	234.572	2,178,957,843	233.912	1.699.500.000	233.912	2.636.262.500	145329,9	1.136.069.498	62,13	43,09	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil	Dokumen	1	60.000.000	1	1.000.000	1						
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	5		5	1.000.000	5						
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Persentase ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil (%)	Unit	50	2.095.957.843	45	1.697.500.000	45	2.636.262.500		1.136.069.498	-	43,09	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Kapal Perikanan berukuran diatas 10 s.d 30 GT yang memiliki izin usaha perikanan		35	380.000.000	160	3.000.000	160	2.275.000	58	1.263.600	36,25	55,54	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap yang diterbitkan	Rekomendasi	250	250.000.000	250	1.000.000	250	1.275.000	9	263.600	3,60	20,67	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (rekomendasi)	Dokumen	100	250.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		1.000.000	-	100,00	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1		1	1.000.000	1						
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil							2.000.000							
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1		1	1.000.000	1						
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	50		50	1.000.000	50						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan						
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							2.000.000								
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1		1	1.000.000	1							
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	500		500	1.000.000	500							
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM (Unit)	Unit	1,00	5.167.442.138	1	21.096.000.000	1	21.739.585.000	1	11.274.073.305	100,00	51,86		
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan	Pelabuhan perikanan	2	300.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000		1.000.000		100,00		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang tersedia	Unit	11178	1.215.550.000	4	21.095.000.000	4	19.717.085.000		9.545.468.105				
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan	Layanan	12996	1.582.476.810	5	2.000.000	5	2.021.500.000		1.727.605.200		85,46		
	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	50		50	2.000.000	50							
Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT							2.000.000		2.000.000		1.760.000				
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1		1	1.000.000	1	1.000.000		880.000				
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	220		220	1.000.000	220	1.000.000		880.000				
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							2.000.000								
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	550		550	2.000.000	550							
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>Ton</b>	<b>1.243.385</b>	<b>5.920.933.474</b>	<b>1.243.385</b>	<b>3.904.300.000</b>	<b>1.243.385</b>	<b>4.318.346.700</b>		<b>2.677.909.590</b>		<b>62,01</b>	<b>Dislutkan</b>	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				5	100.000,000		2.000.000		968.000		-				
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	5		5	1.000.000	5	968.000		-				
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	1		1	1.000.000	1							
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Produksi budidaya ikan di laut	Ton	946.736	5720933474	930911	3.902.300.000	930911	4.317.378.700		2.677.909.590	-	62,03		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di laut	Unit	9	1.608.184.339	6	1.001.000.000	6	423.195.000		409.510.000	-	96,77		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang tersedia	Unit	4	536.389.885	15	1.050.000.000	15	1.544.732.700		760.395.300	-	49,23		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut	Unit	6	633.434.136	4	929.000.000	4	495.250.000		324.026.600	-	65,43		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan			
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di air payau dan ikan air tawar yang tersedia	Unit	7	481.255.152	6	921.300.000	6	1.854.201.000		1.183.977.690		63,85	Dislutkan
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	10		10	1.000.000	10						
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	12		12	3.000.000	12						
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	12		12	1.000.000	12						
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	12		12	1.000.000	12						
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>Produksi olahan hasil perikanan</b>	<b>Ton</b>	<b>215.700.</b>	<b>922.633.287</b>	<b>170.955,07</b>	<b>239.000.000</b>	<b>170.955,07</b>	<b>214.176.900</b>		<b>31.823.400</b>		<b>14,86</b>	<b>Dislutkan</b>
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya	izin	5	120.301.967	1	10.000.000	1	24.005.900		20.962.400		87,32	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah rekomendasi perizinan berusaha penunjang bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (rekomendasi)	Rekomendasi	5	30.301.967		9.000.000		4.005.900		1.004.900		25,09	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	3	100.000.000	3	1.000.000	3	20.000.000		19.957.500		99,79	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Produksi olahan hasil perikanan dari pelaku usaha yang menerapkan GMP	ton	21,57	748.200.988	170.955,07	224.000.000	170.955,07	185.171.000		9.961.000		5,38	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Unit usaha	5	748.200.988	5	224.000.000	5	185.171.000		9.961.000		5,38	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah stok ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	ton	384270	60.222.089	359000	5.000.000	359000	5.000.000	333910,8	900.000	93,01	18,00	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi (unit)	Dokumen	15	20.000.000		1.000.000		1.000.000	0	900.000		90,00	
	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberikan insentif dan fasilitas	Unit usaha	35	40.222.089	40	4.000.000	40	4.000.000	43	-	107,50	-	
												90,16	48,33	
<b>Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin</b>		<b>Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)</b>	<b>%</b>				<b>100</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi</b>	<b>%</b>				<b>85</b>						<b>24,71</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>		<b>Persentase PMB,KPO,KTK (Korban Tindak Kekerasan) dan OT yang tertangani</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.356.150.635</b>	<b>100</b>	<b>440.124.000</b>	<b>100</b>	<b>442.124.000</b>		<b>277.522.614</b>		<b>38,63</b>	<b>Dinas Sosial</b>

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Tertanganinya PMI bermasalah, KTK dan KPO	Orang	400		400	440.124.000	400	442.124.000		277.522.614		0,00	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Orang	300	300	440.124.000	300	442.124.000		277.522.614		35,22		
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani</b>	%	<b>4,5</b>	<b>53.397.902.044</b>	<b>4,5</b>	<b>15.471.016.525</b>	<b>4,5</b>	<b>13.261.285.077</b>		<b>11.185.321.202</b>			Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Terlaksananya keberfungsian sosial disabilitas terlantar	Orang	400		400	631.000.000	400	2.174.159.400		1.714.573.545			
	Penyediaan Permakanan								1.297.900.000		970.393.410			
	Penyediaan Sandang								32.000.000		-			
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses								39.500.000		39.497.500			
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	500		500	589.000.000	500	590.000.000		576.970.000			
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti								116.223.900		87.746.135			
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial								54.708.000		39.966.500			
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari								-		-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	1		1	42.000.000	1	43.827.500		-			
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Terlaksananya keberfungsian sosial PPKS di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jiwa	60		60	964.294.700	60						
		Terlaksananya keberfungsian sosial PPKS	Orang	80		80		80						
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	1		1	40.110.000	1						
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pembedayaan	Orang	50		50		50						
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	364.400.000	80						
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	44.075.000	80						
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	10.275.000	80						
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	40		40	49.634.700	40						
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	45.000.000	80						
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	4.800.000	80						
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	316.000.000	80						
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	80		80	90.000.000	80						
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		Terlaksananya keberfungsian sosial anak terlantar	Orang	5120		5120	13.875.721.825	5120	7.128.645.950		6.276.057.117			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023						Peringkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan				
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	710		710	3.939.515.000	710	1.930.275.000		1.545.024.500		
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	770		770	197.450.000	770	140.700.000		121.800.000		
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	770		770	155.139.500	770	75.105.000		64.097.000		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	770		770	218.522.425	770	66.266.050		35.905.600		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	710		710	696.084.400	710	617.408.400		529.950.042		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Laporan	17		17	4.228.919.500	17	3.815.766.500		3.589.189.975		
		Jumlah Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar dalam Panti	Anak	5000		5000	3.963.366.000	5000					
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	530		530	102.000.000	530	81.000.000		69.440.000		
	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	90.000.000	80	90.000.000		75.000.000		
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	271.125.000	80	312.125.000		245.650.000		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50		50	3.600.000	50					
	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	50		50	10.000.000	50					
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti									2.187.301.527		1.645.117.580		
	Penyediaan Permakanaan								1.679.425.000		1.245.254.050		
	Penyediaan Sandang								103.470.000		103.420.000		
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses								136.471.200		101.871.200		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial								120.255.327		107.202.330		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial								74.000.000		46.200.000		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari								6.900.000		3.300.000		
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								32.080.000		14.460.000		
	Pemulasaraan								34.700.000		23.410.000		
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti									861.998.500		834.345.960		
	Penyediaan Permakanaan								361.095.000		359.774.500		
	Penyediaan Sandang								60.079.000		60.079.000		
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses								8.406.700		3.904.100		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti								8.185.800		7.818.800		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial								66.900.000		66.900.000		
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar								310.780.000		310.019.000		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti								46.552.000		25.850.560		
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Terlaksananya keberfungsian sosial PPKS di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jiwa	60		60	964.294.700	60	909.179.700		715.227.000		
	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	364.400.000	80	362.000.000		309.112.000		
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	44.075.000	80	44.075.000		44.075.000		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023				Perangkat Daerah Penanggung					
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu				Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	10.275.000	80	10.275.000						
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	40		40	49.634.700	40	49.634.700			29.930.000			
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	45.000.000	80	44.200.000			34.770.000			
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	4.800.000	80	4.800.000			-			
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80		80	316.000.000	80	316.000.000			248.180.000			
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	80		80	90.000.000	80	78.195.000			38.885.000			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37.283.915.612	100	23.778.085.000	100	19.561.258.000			4.560.886.622		23,32	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	50		50		50							
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Terlaksananya pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	Orang	3		3	21.775.000	3	21.775.000			-			
	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	3		3	21.775.000	3	21.775.000			-			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Terlaksananya verval data	%	100		100	23.756.310.000	100	19.539.483.000			4.560.886.622		23,34	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	150		150	40.000.000	150	30.000.000			5.350.000			
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	1000		1000	18.547.310.000	1000	14.362.443.000			4.535.764.397		31,58	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	150		150	5.169.000.000	150	5.147.040.000			19.772.225		0,38	
														22,15	
<b>Sasaran 4: Meningkatkan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan</b>		<b>Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</b>	<b>Skor</b>				<b>87</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</b>		<b>Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan</b>	<b>%</b>		<b>770.871.786</b>		<b>87</b>					<b>100,0</b>			<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	Persen		770.871.786		9					-			
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	Unit		594.908.418		6					-			
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	Unit		45.000.000		1					-			
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dibangun	Unit		130.963.367		2					-			
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>		<b>Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>770.949.100</b>	<b>100,00</b>	<b>316.264.500</b>	<b>100,00</b>	<b>891.264.500</b>			<b>153.680.318</b>		<b>17,24</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>
		<b>Rata-Rata Konsumsi Energi</b>	<b>KKal/Kap/Hari</b>	<b>2643,10</b>	<b>303.393.880</b>	<b>2643,10</b>		<b>2643,10</b>							



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tingkat Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Tahun	8.294,57	770.949.100	8.294,57	115.000.000	8.294,57	115.000.000		90.396.770		78,61	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	-	1.018.510.000	-	30.000.000	-	30.000.000		28.440.000		94,80	
		Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan	Dokumen	2	9.373.297.884	2		2						
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM)	Ton	1	770.949.100	1	25.000.000	1	25.000.000		18.367.020		73,47	
		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	-	303.393.880	-		-						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan	Dokumen	2	230.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		25.293.750		84,31	
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	-	265.000.600	-		-						
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	-	275.948.500	-	30.000.000	-	30.000.000		18.296.000		60,99	
		Jumlah LDPM/PUPM/Pasar Mitra Tani yang dibina	Unit	1	1.018.510.000	1		1						
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	23	1.018.510.000	23	35.000.000	23	660.000.000		7.250.000		1,10	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	Ton	2	9.373.297.884	2	35.000.000	2	660.000.000		7.250.000		1,10	
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	-	242.509.084	-		-						
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	Persen	90	9.130.788.800	90	166.264.500	90	116.264.500		56.033.548		48,19	
	Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti	Event	1		1	16.264.500	1	16.264.500		3.314.500			
		Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	-		-		-						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1		1	150.000.000	1	100.000.000		52.719.048			
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>		<b>Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)</b>	%	5	1.268.451.063	5	100.000.000	5	100.000.000		91.480.000		91,48	Dinas Ketahanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	Desa	14	1.268.451.063	14	100.000.000	14	100.000.000		91.480.000		91,48	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	540.951.063	1	30.000.000	1	30.000.000		27.840.000			
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penduduk rentan rawan pangan yang difasilitasi bantuan hibah pangan	Orang	250	727.500.000	250	70.000.000	250	70.000.000		63.640.000		90,91	
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>		<b>Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan</b>	Persen	90	1.857.153.698	90	60.000.000	90	140.000.000		97.883.300		69,92	Dinas Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	Komoditi	20	495.420.000	20	60.000.000	20	140.000.000		97.883.300		69,92	
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Kali	4	495.420.000	4	40.000.000	4	30.000.000		29.940.000		99,80	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung		
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)					
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan			
		Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		828.192.667					50.000.000			27.937.300		55,87	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji	Komoditi	20	533.541.031	20	20.000.000	20	40.000.000				26.223.000		65,56	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	0	252.737.289	0		0	20.000.000				13.783.000		68,92	
			Komoditi				100					20		20,00	64,65	
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>		<b>Cakupan Air Minum</b>	<b>%</b>				<b>81</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>Cakupan Air Minum</b>	<b>%</b>	<b>81</b>	<b>10.224.348.000</b>	<b>81</b>	<b>2.749.273.400</b>	<b>81</b>	<b>2.370.762.500</b>				<b>2.014.813.200</b>		<b>84,99</b>	<b>Dinas PUPR</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	SR	240		240	2.749.273.400	240	2.370.762.500				2.014.813.200		84,99	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						1.070.215.900									
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	%	81		81	1.679.057.500	81	2.370.762.500				2.014.813.200		84,99	
															84,99	
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>		<b>Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak</b>	<b>%</b>				<b>82</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar</b>	<b>%</b>				<b>100</b>									<b>Dinas Kesehatan</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		<b>Luas kawasan permukiman yang berkualitas</b>	<b>Ha</b>	<b>84.511</b>	<b>587.290.665.869</b>	<b>84.511</b>	<b>377.914.567.400</b>	<b>84.511</b>	<b>417.894.443.400</b>				<b>191.072.671.975</b>		<b>45,72</b>	<b>Dinas Perumahan dan Permukiman</b>
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			%	100		100	377.914.567.400	100	417.894.443.400				191.072.671.975			
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	-	1.029.079.161	-	377.914.567.400	-	417.894.443.400				191.072.671.975		45,72	
		Jumlah penanganan PSU permukiman	Paket	1.159	1.029.079.161	1.159		1.159								
															45,72	
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>		<b>Rasio Elektrifikasi</b>	<b>%</b>				<b>100</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>		<b>Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)</b>	<b>%</b>	<b>19</b>	<b>1.882.329.210</b>	<b>19</b>	<b>54.967.900</b>	<b>19</b>	<b>151.972.900</b>	<b>20,44</b>		<b>53.634.920</b>	<b>106,57</b>	<b>35,29</b>	<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	
		<b>Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik</b>	<b>%</b>	<b>6</b>	<b>214456005,9</b>	<b>6</b>		<b>6</b>		<b>54,41</b>			<b>976,84</b>			
Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun		Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	Rekomendasi	2	131729920,1	2	19.999.700	2	36.999.700	2		21.233.120	100,00	57,39		
		Meningkatnya penggunaan sarana EBT	%	6	82726085,73	6		6		2			35,91			
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun			1667873204		9.999.800		14.999.800	0		8.093.120		53,95		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin	2	356100248,8	2	9.999.900	2	21.999.900	0	13.140.000	-	59,73	
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Meningkatnya penggunaan sarana EBT	%	6	1043699463	6	34.968.200	6	114.973.200	0	32.401.800		28,18	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi	Jumlah kebijakan	Dokumen	1		1	10.497.400	1	10.497.400		6.120.000			
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Orang	100		100	14.970.800	100	14.970.800		12.231.800			
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun	Unit	20		20	9.500.000	20	89.505.000		14.050.000			
		Jumlah fasilitas EBT yang di Rehabilitasi												
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>		<b>Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5379628786</b>	<b>100</b>	<b>170.899.000</b>	<b>100</b>	<b>216.113.000</b>	<b>100</b>	<b>66.426.993</b>	<b>100,01</b>	<b>30,74</b>	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		<b>Rasio elektrifikasi (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>285942199</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>20</b>		<b>20,00</b>		
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase rumah tangga berlistrik			178715304,1		46.649.000		50.649.000	50	30.736.993			
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Rekomendasi	32	107226894,9	32	21.399.000	32	19.399.000	10	14.969.000	31,25		
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	Izin	32	285885367,4	32	20.250.000	32	31.250.000	0	15.767.993		50,46	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	-	178694215,6	-	5.000.000	-		0				
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Meningkatnya rasio elektrifikasi	%	100	107191151,8	100	124.250.000	100	165.464.000	0	35.690.000		21,57	
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	RTS	50		50	124.250.000	50	135.250.000		35.690.000			
												171,32	42,16	
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>		<b>Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)</b>	<b>%</b>				<b>69</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>		<b>Persentase rumah tangga menempati hunian layak</b>	<b>%</b>	<b>99</b>	<b>7.063.959.946</b>	<b>99</b>	<b>271.560.300</b>	<b>99</b>	<b>438.042.700</b>		<b>107.653.942</b>		<b>24,58</b>	Dinas Perumahan dan Permukiman
		<b>Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>		<b>100</b>						
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah data rumah terdampak bencana	%	100	1.227.471.539	100	69.648.700	100	32.818.400		22.338.900		68,07	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen pendataan rumah terdampak bencana	Dokumen	1	620.411.785	1	34.991.000	1	16.015.000		8.505.000		53,11	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase penerima bantuan rumah terdampak bencana yang terverifikasi	%	100	607.059.754	100	34.657.700	100	16.803.400		13.833.900		82,33	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah data rumah terdampak yang valid	%	100	997.844.228	100	60.950.300	100	333.000.500		81.771.242		24,56	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Peringkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi rehabilitasi rumah terdampak bencana	OK	70	425.158.412	70	30.190.000	70	29.035.500		119.000		0,41	
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi mengenai program perumahan	OK	80	4.838.644.180	80	30.760.300	80	303.965.000		81.652.242	-	26,86	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Jumlah rumah yang terbangun sesuai data verifikasi dan validasi	%	100		100	140.961.300	100	72.223.800		3.543.800			
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit rumah	-		-	140.961.300	-	72.223.800		3.543.800	-		
		Persentase rumah yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana dan relokasi permukiman	Unit	10		10		10						
												0,00	39,99	
<b>Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok</b>		<b>Inflasi</b>	<b>%</b>				<b>3,0 - 4,0</b>			<b>0,30</b>		<b>-8,33</b>		
<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>Cakupan Pengawasan An Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>874.409.856</b>	<b>80</b>	<b>189.998.900</b>	<b>80</b>	<b>169.998.900</b>	<b>60</b>	<b>82.311.190</b>	75,00	48,42	Dinas Perdagangan
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	%	7	90.000.000	7	45.000.000	7	45.000.000	4	28.407.840	57,14	63,13	
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	7	90.000.000	7	45.000.000	7	45.000.000	4	28.407.840	57,14	63,13	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor	Persen	6	93.000.000	6	44.998.900	6	44.998.900	4	13.940.000	66,67	30,98	
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	93.000.000	6	44.998.900	6	44.998.900	4	13.940.000	66,67	30,98	
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	Persen	7	93.000.000	7	100.000.000	7	80.000.000	3	39.963.350	42,86	49,95	
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan	Dokumen	6	93.000.000	6	50.000.000	6	40.000.000	3	21.083.350	50,00	52,71	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	6		6	50.000.000	6	40.000.000	3	18.880.000			
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		Persentase SKA yang diterbitkan	Persen	100	93.000.000	0		0		0				
	Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	175	93.000.000	0		0		0				
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok</b>	<b>%</b>	<b>4</b>	<b>5.179.316.326</b>	<b>4</b>	<b>205.000.000</b>	<b>4</b>	<b>740.500.000</b>	<b>3</b>	<b>675.700.903</b>	75,00	91,25	Dinas Perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga di Tingkat Provinsi	Laporan	32	80.000.000	32	50.000.000	32	40.500.000	25	27.677.210	78,13	68,34	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persen	8	40.000.000	8	29.781.000	8	25.281.000	9	16.856.815	112,50	66,68	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persen	8	40.000.000	8	20.219.000	8	15.219.000	6	10.820.395	75,00	71,10	
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi	Persen	32	250.000.000	32	120.000.000	32	665.000.000	22	630.676.647	68,75	94,84	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	100.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	9	27.889.467	75,00	84,51	
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	12	150.000.000	12	87.000.000	12	632.000.000	10	602.787.180	83,33	95,38	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kabupaten/Kota Terawasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Persen	10		10	35.000.000	10	35.000.000	6	17.347.046	60,00	49,56	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4		4	35.000.000	4	35.000.000	2	17.347.046	50,00	49,56	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>	<b>4.070.555.572</b>	<b>5</b>	<b>321.967.600</b>	<b>5</b>	<b>300.007.700</b>	<b>8,2465</b>	<b>124.182.643</b>	<b>164,93</b>	<b>41,39</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	Persen	6	1.800.000.000	6	321.967.600	6	300.007.700	5	124.182.643	83,33	41,39	
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku usaha	12	850.000.000	12	50.000.000	12	46.500.000	0	-	-	-	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku usaha	40	250.000.000	30	82.500.600	30	79.355.700	30	61.804.000	100,00	77,88	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha	12	200.000.000	12	181.500.000	12	68.435.000	2	56.344.350	16,67	82,33	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku usaha	12	850.000.000	0	50.000.000	0	46.500.000	0	-	-	-	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	10	300.000.000	10	7.967.000	10	105.717.000	1	6.034.293	10,00	5,71	
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Cakupan Penyelesaian Sengketa</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>3.914.544.303</b>	<b>80</b>	<b>1.492.601.300</b>	<b>80</b>	<b>1.565.541.300</b>	<b>72</b>	<b>1.305.005.133</b>	<b>90,00</b>	<b>83,36</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen yang ditangani diseluruh di Kab/Kota	%	55	2.280.000.000	55	1.427.651.500	55	1.501.591.500	36	1.283.895.133	65,45	85,50	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	55	180.000.000	55	3.016.500	55	3.016.500	36	2.307.400	65,45	76,49	
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	4	90.000.000	4	1.382.635.000	4	1.493.737.900	4	1.279.431.733	100,00	85,65	
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama	LPKSM	4	290.000.000	4	42.000.000	4	4.837.100	9	2.156.000	225,00	44,57	
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Toko Retail di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar / Jasa	Jumlah Toko	60	180.000.000	60	38.949.800	60	38.949.800	0	21.110.000	-	54,20	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasis	55	90.000.000	55	26.699.800	55	26.699.800	0	9.150.000	-	34,27	
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Laporan	4	90.000.000	4	12.250.000	4	12.250.000	2	11.960.000	50,00	97,63	
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Komoditi Teruji	Komoditi	10	90.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	0	-	-	-	
	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	10	90.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	0	-	-	-	
<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM NEGERI</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>37.550.068.505</b>	<b>100</b>	<b>6.084.499.900</b>	<b>100</b>	<b>5.017.015.400</b>	<b>90</b>	<b>452.777.535</b>	<b>90,00</b>	<b>9,02</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	Persen	30	5.894.639.381	60	5.673.249.900	60	4.324.615.400	57	260.368.413	95,00	6,02	
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri		200	5.894.639.381	4000	5.673.249.900	4000	4.324.615.400	175	260.368.413	4,38	6,02	
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan	UMKM	14	2.000.000.000	14	368.750.000	14	599.900.000	8	178.642.672	57,14	29,78	
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	200	2.000.000.000	200	368.750.000	200	599.900.000	175	178.642.672	87,50	29,78	
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UKM Terakomodir di Retail	Dokumen	15	370.000.000	15	42.500.000	15	92.500.000	7	13.766.450	46,67	14,88	
	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		4		0		0		0				
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	12	175.000.000	12	42.500.000	12	92.500.000	7	13.766.450	58,33	14,88	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Dokumen	175	175.000.000	0	42.500.000	0	92.500.000	0	13.766.450		14,88	
												64,18	47,47	
Sasaran 7: Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup		Pengeluaran per kapita (Rp.000)		0,00		0,00	11.944	0,00		0		0,00		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.833.875.000</b>	<b>100</b>	<b>3.608.500.000</b>	<b>100</b>	<b>3.739.562.500</b>	<b>100</b>	<b>990.994.618</b>	<b>100,00</b>	<b>26,50</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Persen	10	8.680.000.000	10	3.608.500.000	10	3.739.562.500	10	990.994.618	100,00	26,50	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1300	8.500.000.000	1300	3.608.500.000	1300	3.739.562.500	2	990.994.618	0,15	26,50	
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi		175		0		0		0				
												66,72	26,50	
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan		Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%											
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata		Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Miliar				137			49,35		35,96		
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>		<b>Persentase desa wisata yang dikembangkan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>16.580.012.830</b>	<b>100</b>	<b>6.451.999.000</b>	<b>100</b>	<b>7.051.378.473</b>		<b>1.669.717.400</b>		<b>23,68</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>
		Persentase Geosite yang tertata	%	50	-	50		50						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan						
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi					325.955.000		10.000.000		25.000.000				40,00		
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)					10.000.000		25.000.000			10.000.000		40,00	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kawasan Pariwisata Terstandar yang Terbangun	Kawasan	3	378.843.500		10.000.000		14.500.000			6.700.000			
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Kawasan	1	750.075.000	30	10.000.000	30	14.500.000			6.700.000		46,21	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata yang Minimal Berkembang	Persen	14,14		3	6.432.000.000	3	6.997.879.473			1.647.408.400		23,54	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	17		1	6.232.000.000	1	5.006.411.000			1.271.536.150		25,40	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	15	2.000.408.500		267.380.973		1.991.468.473			375.872.250		18,87	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pariwisata yang Kredibel	Persen	30			9.999.000		13.999.000			5.609.000		40,07	
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	3			9.999.000		13.999.000			5.609.000		40,07	
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>		<b>Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan</b>	<b>orang</b>	<b>5.200.000</b>	<b>7.391.905.747</b>	<b>5.200.000</b>	<b>1.393.171.100</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.885.004.412</b>			<b>2.968.258.200</b>		<b>76,40</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	3.000.000	5.036.461.400	3.000.000	1.393.171.100	3.000.000	3.885.004.412			2.968.258.200		76,40	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	5	1.341.839.200	5	1.011.533.200	5	1.268.533.200			1.203.136.000		94,84	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	13	2.756.400.000	13	300.000.000	13	2.524.645.000			1.742.081.700		69,00	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	300.005.000	4	3.637.900	4	3.637.900			3.540.500		97,32	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	5	638.217.200	5	78.000.000	5	88.188.312			19.500.000		22,11	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>		<b>Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>606.633.173</b>	<b>100</b>	<b>371.240.600</b>	<b>100</b>	<b>4.088.451.600</b>			<b>3.796.086.395</b>		<b>92,85</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah Memiliki HaKI	Persen	40,21	5.270.345.000	40,21		40,21							
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Persentase Peningkatan Kapasitas Pemasaran Ekonomi Kreatif	Persen	10	150.000.000	10	371.240.600	10	4.088.451.600			3.796.086.395		92,85	
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Laporan	14	2.143.212.500	14	201.240.600	14	3.891.040.600			3.665.743.395		94,21	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	6	1.200.000.000	6	150.000.000	6	177.411.000			130.343.000		73,47	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	3	277.132.500	3	20.000.000	3							
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>		<b>Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.506.228.054</b>	<b>100</b>	<b>137.010.000</b>	<b>100</b>	<b>129.421.000</b>			<b>30.646.800</b>		<b>23,68</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Persentase Peningkatan Jumlah Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut	Persen	5	2.500.000.000	5	137.010.000	5	129.421.000		30.646.800		23,68	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	240	1.035.093.720	240	80.000.000	240	72.411.000		22.196.800			
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang	480	253.661.760	480	57.010.000	480	57.010.000		8.450.000	-	14,82	
													52,25	
<b>Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul</b>		<b>Pertumbuhan Industri (%)</b>	<b>%</b>											
<b>Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri</b>		<b>Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan</b>	<b>Rp. Milyar</b>				<b>180</b>			<b>-2,43</b>		<b>-1,35</b>		
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>102.322.211.223</b>	<b>100</b>	<b>5.939.697.710</b>	<b>100</b>	<b>5.367.383.910</b>		<b>2.042.775.621</b>		<b>38,06</b>	<b>Dinas Perindustrian</b>
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100		100		100				20,00		
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan industri yang tersusun	Dokumen	1		1	5.939.697.710	1	5.367.383.910		2.042.775.621	100,00	38,06	
		Jumlah Masyarakat penerima hibah barang	orang	100		100		100				100,00		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1		1	248.091.710	1	83.170.000		47.288.000	0,00	56,86	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	0		0	75.000.000	0	75.000.000		24.917.860	25,00	33,22	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1		1		1				12,50		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1		1	270.000.000	1	94.443.200		77.430.663	0,00	81,99	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1		1	725.691.710	1	695.691.710		500.795.041			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1		1	4.576.122.500	1	4.419.079.000		1.392.344.057			
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		<b>Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah</b>	<b>%</b>	<b>3,55</b>	<b>3.018.338.892</b>	<b>3,55</b>	<b>199.850.000</b>	<b>3,55</b>	<b>240.320.000</b>		<b>79.364.782</b>		<b>33,02</b>	<b>Dinas Perindustrian</b>
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Jumlah pengawasan izin usaha yang dilakukan	Kali	30		30	199.850.000	30	240.320.000		79.364.782	19,02	33,02	



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Kinerja (%)	Keuangan (%)	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen	0		0	161.000.000	0	161.000.000		19.197.608	2,14	11,92	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	1		1	38.850.000	1	79.320.000		60.167.174	100,00	75,85	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Cakupan database IKM se NTB dalam sistem informasi industri nasional</b>	%	1	2.043.024.494	1	150.000.000	1	170.000.000		79.473.260		32,76	Dinas Perindustrian
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah informasi industri yang tersusun	Dokumen	1		1	150.000.000	1	170.000.000		79.473.260	11,23	46,75	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1		1	75.000.000	1	95.000.000		18.080.000	0,00	19,03	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	1		1	75.000.000	1	75.000.000		61.393.260	50,00	81,86	
<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>					4.806.536.363		365.066.500		278.956.500		65.303.901		23,41	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan							365.066.500		278.956.500		65.303.901		23,41	
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit usaha	0,00		0,00	332.643.300	0,00	246.533.300		65.303.901		26,49	
		Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha	PUK	50,00		50,00		50,00						
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	500,00		500,00	32.423.200	500,00	32.423.200		-			
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		<b>Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM</b>			7.967.004.066		815.614.600		763.238.600		308.619.880		40,44	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Pelaku UMKM yang Mendapatkan Pelayanan Penyuluhan Hukum	orang	420		420	462.433.500	420	763.238.600		308.619.880			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit usaha				462.433.500		426.543.500		308.619.880			
		Jumlah yang difasilitasi peningkatan akses pemasaran jaringan usaha melalui Promosi/Expo dan Pameran di Provinsi lainnya	PUK	50		50		50						
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Mendapatkan Pelayanan Penyuluhan Hukum	Orang	300		300	353.181.100	300	336.695.100		-		-	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>		<b>Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.350.050.780</b>	<b>100</b>	<b>3.521.474.700</b>		<b>1.240.263.420</b>		<b>35,22</b>	Dinas Pemuda dan Olahraga
		<b>Persentase Pembinaan Pemuda Berprestasi</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>						
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang	160	160	160	3.350.050.780	160	3.521.474.700		1.240.263.420		35,22	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi untuk tingkat nasional	Orang	1	15	1	125.000.000	1	117.500.000		114.285.160		97,26	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah wirausaha muda yang mengikuti pelatihan	Orang	100	18	100	25.000.000	100	25.000.000		25.000.000		100,00	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	0	20	0	885.050.780	0	1.161.474.800		355.033.800		30,57	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terpelihara	Unit	1	60	1		1						
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Lembaga atau Organisasi Kepemudaan yang Difasilitasi	Lembaga	20		20	2.215.000.000	20	2.110.000.000		700.000.000			
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Orang	25		25	100.000.000	25	107.499.900		45.944.460			
												31,42	43,24	
<b>Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka</b>		<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	%							<b>2,80</b>		<b>111,67</b>		
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi</b>	%	<b>18</b>	<b>3.481.991.780</b>	<b>18</b>	<b>628.276.660</b>	<b>18</b>	<b>816.236.600</b>	<b>8,35</b>	<b>364.695.750</b>	<b>46,4</b>	<b>44,68</b>	Dsinakertrans
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	orang	567	3.241.733.400	460	409.989.940	460	797.949.660	444	349.696.750	96,52	43,82	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	300	1.092.070.448	300	409.989.720	300	537.959.660	0	336.726.750	-	-	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	5	2.044.288.965	2	200.000.000	2	259.990.000	0	12.970.000	-	4,99	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah LPK yang di Akreditasi	LPK	100	105.373.987	40	15.000.140	40	15.000.140	20	14.999.000	50,00	99,99	
	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	100	147.454.000	40	15.000.140	40	15.000.140	10	14.999.000	25,00	99,99	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah peserta movev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	55	147.454.000	20	3.286.800	20	3.286.800	0	-	-	-	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	55	92.804.380	20	3.286.800	20	3.286.800	0	-	-	-	
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan</b>	%	<b>57,48</b>	<b>3.391.251.944</b>	<b>57,48</b>	<b>375.000.000</b>	<b>57,48</b>	<b>469.379.400</b>	<b>43,96</b>	<b>265.465.400</b>	<b>76,5</b>	<b>56,56</b>	Dsinakertrans
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	Orang	480	910.699.800	160	21.456.000	160	19.089.000	215	8.078.400	134,38	42,32	



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan						
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase penurunan konflik sosial	%							0,00		0,00			
<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1.526.591.849	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000			551.489.800		55,15	Bakesbangpolda gri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Wawasan Kebangsaan	Dokumen	3	562.456.540,81	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000			551.489.800		55,15	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	500	-	500	836.000.000	500	836.000.000			444.382.420			
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	383.444.004,09	1	164.000.000	1	164.000.000			107.107.380		65,31	
<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>		Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	11.105.209.927	11,43	3.245.564.000	11,43	77.724.313.100			5.751.349.560		7,40	Bakesbangpolda gri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	1	3.191.596.560,53	1	3.245.564.000	1	77.724.313.100			5.751.349.560		7,40	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100	855.085.701,90	100	1.145.445.000	100	77.306.198.100			5.416.326.000		7,01	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100	303.454.831,72	100	212.349.000	100	244.885.000			172.852.320		70,59	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	125.732.088,37	1	50.660.000	1	173.230.000			162.171.240		93,62	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1.907.323.938,74	1	1.837.110.000	1							
<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643.073.798	100	67.963.466.918	100	73.348.893.918			30.253.717.575		41,25	Biro Kesejahteraan Rakyat

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual	%	100	100.348.573.728	100	31.882.918.068	100	35.837.703.500		21.265.862.025		59,34	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	4	89.954.926.705	4	30.757.919.908	4	33.624.755.240		19.946.895.825		59,32	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	5	10.393.647.022	5	1.124.998.160	5	2.212.948.260		1.318.966.200		59,60	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Tersedianya Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Dokumen	6	190.236.028.124	6	35.630.549.350	6	37.110.190.918		8.776.049.800		23,65	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	3	186.708.519.065	3	26.046.300.000	3	24.325.082.900		3.958.878.500		16,27	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	2	3.025.514.118	2	306.249.600	2	192.250.000		130.110.000		67,68	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	1	501.994.941	1	9.277.999.750	1	12.592.858.018		4.687.061.300		37,22	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Tersedianya Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen	3	2.058.471.946	3	449.999.500	3	400.999.500		211.805.750		52,82	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	1	855.856.277	1	124.999.900	1	106.599.900		68.947.500		64,68	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	1	424.296.999	1	199.999.800	1	184.399.800		101.518.850		55,05	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	1	778.318.670	1	124.999.800	1	109.999.800		41.339.400		37,58	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>Persentase Bumdes Aktif</b>	<b>%</b>	<b>37</b>	<b>9.389.913.516</b>	<b>37</b>	<b>1.968.000.000</b>	<b>37</b>	<b>1.878.000.000</b>	<b>52,54</b>	<b>1.320.176.537</b>	<b>142,0</b>	<b>70,30</b>	<b>DPMDes Dukcapil</b>
		<b>Persentase Lembaga Adat Aktif</b>	<b>%</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		<b>68,35</b>		<b>75,9</b>		
		<b>Persentase Pokja Posyandu aktif</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>85,13</b>		<b>85,1</b>		
		<b>Persentase Posyantek yang aktif</b>	<b>%</b>	<b>64,96</b>		<b>64,96</b>		<b>64,96</b>		<b>65,81</b>		<b>101,3</b>		
Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa	Lembaga	10	9.389.913.516	10	1.968.000.000	10	1.878.000.000	22,98	1.320.176.537	-	91,42	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	961.311.217	1	180.000.000	1	130.000.000	30	11.400.000	100,00	99,78	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	1	416.990.000	1	440.000.000	1	440.000.000	1	46.860.010	1) 2) 3) 4)	85,08	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	6.290.659.154	1	131.000.000	1	156.000.000	1	141.284.967	1) 100 2) 100 3) 100	98,92	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	284.961.117	1	97.000.000	1	122.000.000	1	109.811.560	100,00	99,71	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	244.592.028	1	120.000.000	1	30.000.000	0	10.820.000	100,00	98,79	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	1.191.400.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	0,4	1.000.000.000	100,00	100,00	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		<b>Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan</b>	%	<b>100</b>	<b>6.405.431.759</b>	<b>100</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.352.481.100</b>		<b>1.908.213.510</b>			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan	%	100		100	789.925.000	100	989.925.000		553.180.000			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	150		150	504.195.000	150	526.045.000		314.780.000			
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	6		6	285.730.000	6	463.880.000		238.400.000			
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Persentase sekolah yang dibina	%	100		100	1.210.075.000	100	1.210.075.000		834.118.510			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Obek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	25		25	1.210.075.000	25	1.210.075.000		834.118.510			
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									1.152.481.100		520.915.000			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat								1.152.481.100		520.915.000			
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>		<b>Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	%	<b>100</b>	<b>1.426.928.736</b>	<b>100</b>	<b>159.718.300</b>	<b>100</b>	<b>159.718.300</b>		<b>132.786.700</b>		83,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sanggar sekolah / sanggar masyarakat yang dibina	%	100		100	159.718.300	100	159.718.300		132.786.700		83,14	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	1000		1000	159.718.300	1000	159.718.300		132.786.700		83,14	
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>		<b>Cakupan pembinaan sejarah</b>	%	<b>100</b>	<b>719.796.541</b>	<b>100</b>	<b>416.251.100</b>	<b>100</b>	<b>416.251.100</b>		<b>241.444.295</b>		58,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	%	40		40	416.251.100	40	416.251.100		241.444.295		58,00	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	100		100	416.251.100	100	416.251.100		241.444.295		58,00	
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas &amp; Penegakan Produk Hukum Daerah</b>		<b>Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>	%				<b>6</b>			<b>0,00</b>		<b>89,38</b> <b>0,00</b>	<b>61,87</b>	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	%	100,00	11.445.268.038	100,00	5.295.836.600	100,00	5.270.378.100		3.186.190.700		60,45	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	-	100,00		100,00						
Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					407.322.754		1.937.866.900		1.923.908.400		1.408.911.932		73,23	
	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	3	245.315.689	3	1.099.000.000	3	1.228.649.540		821.802.903		66,89	
	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	15	1.008.191.008	15	202.771.400	15	73.121.860		72.071.860		98,56	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	147.583.899	2	199.999.900	2	184.541.400		144.236.149		78,16	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	805		805	252.712.100	805	252.712.100		222.247.240		87,94	
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1		1	80.000.000	1	81.500.000		48.281.280		59,24	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	182	199.508.733	182	100.633.500	182	100.633.500		100.272.500			
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1		1	2.750.000	1	2.750.000		-			
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur							3.267.249.800		3.257.249.800		1.688.125.162			
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	4	207.814.021	4	800.000.000	4	800.000.000		467.014.625		58,38	
	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pe	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	2	3.577.534.823	2	47.249.800	2	54.249.800		2.234.300		4,12	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	1		1	2.420.000.000	1	2.403.000.000		1.218.876.237			
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					2.740.669.153		90.719.900		89.219.900		89.153.606		99,93	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	2	37.665.904	2	90.719.900	2	89.219.900		89.153.606		99,93	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		Persentase Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	%	86,21	2.436.780.947	86,21	729.844.300	86,21	742.843.900		449.190.320		60,47	Bakesbangpol daerah
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1	848.629.511,12	1	729.844.300	1	742.843.900		449.190.320		60,47	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	-	1	361.176.400	1	347.556.000		335.213.000		96,45	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	400	253.260.060,03	400	293.787.900	400	320.407.900		70.412.200		21,98	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		241.026.358,63		74.880.000		74.880.000		43.565.120		58,18	
<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>		Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	5.727.596.770	100	720.277.700	100	1.000.287.800	247,9	793.944.855	247,9	79,37	Biro Hukum
		Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		100		100						
		Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		100		100						
		Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		100		100						
		Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		100		100						
		Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		100		100						
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		Persentase fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama	Persen	100	3.900.653.457,15	100	470.024.900	100	532.534.900	47,9	458.101.755	47,86	86,02	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk	Perda	50	937.240.588,17	10	110.000.000	10	105.400.000	0	99.940.000	-	94,82	
			Perkada	150		30		30		14		46,67		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang terbentuk	Kept. Gub	3500		700	110.000.200	700	109.610.200	229	99.980.200	32,71		
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasi dan tersosialisasi kepada masyarakat	Produk Hukum/Perda/Perkada	200	468.619.122,53	40	90.020.500	40	157.520.500	14	127.568.013	35,00	80,99	
		Jumlah MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	Naskah	125		25		25		20		80,00		
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi dan terevaluasi	Perda	250	1.222.824.591,97	50	160.004.200	50	160.004.200	9	130.613.542	18,00	81,63	
			Perbup/Perwal	500		100		100		49		49,00		
Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase kasus-kasus hukum yang terfasilitasi	Persen	100		100	250.252.800	100	467.752.900	4	335.843.100	4		
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah penanganan masalah hukum (Litigasi)	Perkara	20	1.271.969.154,48	4	200.002.800	4	410.002.900	9	285.653.100	225	69,67	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	Perkara	20		4	50.250.000	4	57.750.000	3	50.190.000	75,00		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi HAM (RANHAM)	Dokumen	15		3		3		0				
												71,76	71,68	
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>		<b>Partisipasi Politik Masyarakat (%)</b>	<b>%</b>											
<b>Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat</b>		<b>Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik</b>	<b>%</b>				<b>1</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>		<b>Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>43.528.305.431</b>	<b>100</b>	<b>6.516.334.600</b>	<b>100</b>	<b>77.724.313.100</b>		<b>5.751.349.560</b>		<b>7,4</b>	<b>Bakesbangpolda gri</b>



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Politik Dalam Negeri	Dokumen	1	33.671.239.085,96	1	6.516.334.600	1	77.724.313.100		5.751.349.560		7,40	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	200	33.148.535.456,60	200	6.098.219.600	200	77.306.198.100		5.416.326.000		7,01	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100	279.641.097,96	100	244.885.000	100	244.885.000		172.852.320		70,59	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	278.062.531,40	1	173.230.000	1	173.230.000		162.171.240		93,62	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Persentase Ormas yang aktif</b>	<b>%</b>	<b>83,01</b>	<b>1.631.097.489</b>	<b>83,01</b>	<b>1.900.285.000</b>	<b>83,01</b>	<b>1.815.284.000</b>		<b>734.541.022</b>		<b>40,46</b>	<b>Bakesbangpolda gri</b>
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Laporan Ormas	Dokumen	1	1.600.137.061,11	1	1.900.285.000	1	1.815.284.000		734.541.022		40,46	
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	1.368.000.489,35	100	1.643.300.000	100	1.558.300.000		632.250.000		40,57	
	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	172.786.649,34	100	194.390.000	100	194.389.000		51.338.041		26,41	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	0		0	62.595.000	0	62.595.000		50.952.981		81,40	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	0		0		0						



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	30	85033000	30	112.538.300	30	83.983.300		70.291.360		83,70	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyelenggara lembaga perlindungan perempuan (satgas, gugus tugas, forum layanan) yang mendapatkan pelatihan	orang	30		30	59.966.200	30	57.108.300		43.421.360			
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	0	85033000	0		0						
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	40	623.069.651	40	52.572.100	40	26.875.000		26.870.000		99,98	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>		<b>Index Ketahanan Keluarga</b>	%	<b>5,5</b>	<b>525.129.408</b>	<b>5,5</b>	<b>73.000.000</b>	<b>5,5</b>	<b>73.000.000</b>		<b>15.480.000</b>		<b>21,21</b>	<b>DP3AP2KB</b>
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga	desa	3	525.129.408	3	73.000.000	3	73.000.000		15.480.000		21,21	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	40	363.018.623	40	25.000.000	40	25.000.000		8.630.000		34,52	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	162.110.785	1	48.000.000	1	48.000.000		6.850.000		14,27	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>		<b>Dokumen Gender</b>	dokumen	<b>1</b>	<b>90.540.440</b>	<b>1</b>	<b>18.000.000</b>	<b>1</b>	<b>18.000.000</b>		<b>8.940.000</b>			<b>DP3AP2KB</b>
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Data Gender dan Anak	dokumen	1	90.540.440	1	18.000.000	1	18.000.000		8.940.000			
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1	90.540.440	1	18.000.000	1	18.000.000		8.940.000			
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		<b>Persentase PD yang menerapkan Pengarusutamaan Hak Anak</b>	%	<b>42,00</b>	<b>618.134.168</b>	<b>42,00</b>	<b>360.645.500</b>	<b>42,00</b>	<b>360.645.700</b>	<b>70</b>	<b>323.645.010</b>	<b>166,67</b>	<b>89,74</b>	<b>DP3AP2KB</b>
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	organisasi	50	618.134.168	50	360.645.500	50	360.645.700	75	323.645.010	150,00	89,74	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	50	292.754.857	50	192.845.000	50	192.845.200	75	187.875.070	150,00	97,42	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	10	325.379.312	10	167.800.500	10	167.800.500	0	135.769.940		80,91	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>		<b>169553200,00</b>	<b>817.988.306</b>	<b>1,00</b>	<b>338.964.200</b>	<b>1,00</b>	<b>339.423.300</b>		<b>157.655.200</b>		<b>46,45</b>	<b>DP3AP2KB</b>
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	dokumen	10		10	87.620.000	10	96.825.000		23.890.000		24,67	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	94.725.000	0	87.620.000	0	96.825.000		23.890.000		24,67	
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan pergub perlindungan anak	%	75	169.471.000	75		75						
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	dokumen	10			169.411.000		169.471.000		121.555.200			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	80			169.411.000		169.471.000		121.555.200			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Anak yang mendapat peningkatan kapasitas	orang	36	169.471.000	36	81.933.200	36	73.127.300		12.210.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	432.470.345	0	81.933.200	0	73.127.300		12.210.000		16,70	
		Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang	%	80	122.860.293	80		80						
		Meningkatnya kemampuan kapasitas sumberdaya lembaga dalam upaya perlindungan anak	%	80	641.199.655	80		80						
												29,17	50,02	
												57,98	50,10	